

PEMUDA

Merekonstruksi Ulang
Formasi Strategis Pemuda

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



PEMUDA

Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda

Webinar Seri 8

Kongres Kebudayaan Desa 2020

1-10 Juli 2020



PEMUDA

Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

**Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,
Panggunharjo, Yogyakarta**

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab : Faiz Ahsoul

Editor : Fawaz

Penyelia Aksara : Chusna Rizqati

Tata letak isi : Fitriana Hadi

Desain dan ilustrasi sampul : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana

Cetakan pertama, Agustus 2020

xxxiv+102 hal., 13x19cm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Salah satu pernyataan tokoh nasional perihal pemuda yang paling sering dikutip di banyak tempat adalah pernyataan Bung Karno dalam salah satu pidatonya: beri aku sepuluh orang pemuda, akan kuguncang dunia!

Tidak berselang terlalu lama dari pernyataan Bung Karno itu, terutama ketika sistem ekonomi kapitalis masuk dan diterapkan di negeri ini usai kejatuhan Bung Karno, para pemuda di negeri

ini yang jumlahnya berkali-kali lipat dari 10 orang, berbondong-bondong meninggalkan desa menuju kota dalam gelombang yang panjang hingga hari ini. Mereka meninggalkan desa bukan hendak mengguncang dunia. Mereka datang ke kota untuk menjajal peruntungan, mencari pekerjaan di kota demi mendapat penghasilan yang lebih jelas.

Para pemuda itu tergiur dengan iming-iming mudahnya mencari pekerjaan dan mendapat penghasilan di kota dibanding jika mereka menetap di desa dengan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas dan penghasilan yang dianggap pas-pasan. Petani lagi petani lagi, nelayan lagi nelayan lagi, itu-itu saja pilihan yang tersedia di desa. Begitu anggapan yang muncul karena tersentralisasinya pembangunan selama ini.

Gelombang besar dan panjang dari arus urbanisasi ini meninggalkan kesunyian di desa, hingga pada beberapa kasus membikin desa menjadi tidak berdaya karena tersisa anak-anak dan orang tua yang berdiam diri di sana. Pemuda Indonesia, yang menurut Bung Karno sepuluh orang saja sudah cukup untuk mengguncang dunia, nyatanya jutaan orang dari mereka tanpa disadari mengambil peran besar dalam melemahkan kekuatan desa.

Sekira lima tahun lalu, saya pernah berkunjung ke sebuah desa yang letaknya di kaki sebuah gunung. Desa itu betul-betul sunyi. Hanya sedikit orang tua dan anak-anak yang menetap di desa itu. Sisanya, hampir seluruh pemuda di desa itu, pergi meninggalkan desa untuk bekerja. Ada yang bekerja di kota-kota besar di negeri ini, lebih



banyak lagi yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan Hongkong.

Karena terletak di kaki gunung, desa tersebut sesungguhnya subur. Padi, jagung, tembakau, kopi, dan beberapa jenis pohon buah-buahan tumbuh subur di sana. Sayangnya stigma yang dimunculkan terhadap profesi petani di negeri ini serta rendahnya harga-harga komoditas hasil pertanian membikin para pemuda enggan memilih petani sebagai profesi mereka. Berkah tanah subur yang mereka dapat pada akhirnya sekadar disewakan untuk ditanami ribuan batang pohon sengon karena para pemudanya lebih memilih bekerja di luar desa.

Bukan satu dua desa di negeri ini yang berada pada kondisi semacam itu. Ia ditinggalkan para pemudanya bukan karena keterbatasan sumber daya alam di desa, tetapi ada peran tatanan ekonomi global yang membikin mereka para pemuda pada akhirnya lebih memilih meninggalkan desa beserta potensi besar yang ada di sana.

Di lain pihak, ketika krisis ekonomi terjadi di negeri ini, desa-desa itulah yang pada akhirnya kembali menyubsidi para pemuda di kota yang memilih meninggalkan desa. Orang tua mengirim beras dan sumber pangan lainnya ke kota untuk para pemuda yang kehilangan pekerjaan di kota. Tak cukup sampai di situ, orang tua dipaksa menjual aset tanah mereka di desa juga untuk membantu perekonomian mereka yang berbondong-bondong meninggalkan desa. Hingga pada akhirnya, ketika semua itu belum juga berhasil



membantu mereka mengatasi krisis ekonomi yang mereka alami, mereka yang sebelumnya berbondong-bondong meninggalkan desa kembali ke desa agar bisa tetap bertahan hidup, sementara aset-aset berharga mereka sudah berubah status kepemilikannya.

Wabah Corona yang melanda bumi ini sepanjang tahun 2020 kembali membuktikan itu. Kota terpukul karena wabah juga memberi dampak buruk bagi perekonomian di sana. Desa-desa pada akhirnya kembali menyuksidi kota, dan arus balik pemuda dari kota ke desa-desa terjadi akibat kehilangan pekerjaan di kota dan daya bertahan hidup di kota sudah kian menurun. Desa kembali diandalkan.

Kongres Kebudayaan Desa, yang salah satunya memilih tema bahasan perihal pemuda, saya kira menjadi momen yang tepat untuk kembali membicarakan peran pemuda terhadap pemberdayaan di desa. Lebih lagi krisis ekonomi mengintai di depan mata. Arus balik para pemuda ke desa tak bisa dihindari lagi karena perekonomian di kota yang sebelumnya mereka andalkan kini dalam kondisi limbung.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari lima pembicara di Kongres Kebudayaan Desa, Webinar Seri 8 dengan tema PEMUDA: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa, ditambah satu tulisan hasil seleksi *call for papers*. Enam tulisan dalam buku ini yang seluruhnya bernada mirip, suara-suara perihal berdayanya desa dengan pemuda sebagai ujung tombak pemberdayaan itu. Ada aura optimisme yang terpancar dari tulisan-tulisan dalam buku ini. Optimis akan masa depan desa di tangan pemuda dengan syarat para pemuda desa mau berdiam di desa dan ambil peran aktif dalam kerja-kerja kolektif di desa.



Dengan membaca enam tulisan dalam buku ini, Anda akan diajak bernostalgia, berefleksi, serta turut optimis memandang masa depan desa bersama pemuda-pemuda yang kembali ke desa dan ambil bagian dalam kerja-kerja bersama. Selamat membaca.

Yogyakarta, 7 Agustus 2020





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-

desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksikan dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah

rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.



Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan.



Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Melawan korupsi dari desa

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit

materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh.



Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara



ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi



yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah

satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau holopis kuntul baris, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.



Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini problem solving yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. Tagline “Desa untuk Semua



Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera
bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.*

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegaskan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,



tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retorik, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.



Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut science mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





Daftar Isi

Pengantar Editor.....	v
Sekapur Sirih	
1. Gubernur DIY.....	x
Hamengku Buwono X	
2. Direktur Dikyanmas KPK.....	xv
Giri Suprapdiono	
3. Menteri Desa, PDTT.....	xx
Abdul Halim Iskandar	

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud	xxiv
Dr. Hilmar Farid	
Gerakan Pemuda Desa: Gerakan Warga Biasa.....	1
Greg Sindana	
Renungan Anak Petani di Desa, Kala, Patra: Tempat, Waktu, dan Keadaan.....	14
Gede Robi Supriyanto	
Menyambut Anak-Anak Muda Kembali ke Desa.....	27
Iqbal Aji Daryono	
Peran Pemuda dalam Menghadapi Tatanan Baru Imbas Pandemi Covid-19.....	36
Adung Abdul Rahman	
Pemuda dan Pembangunan Desa.....	46
Sunanto	
Pemuda dan Aksi Nyata: Strategi Menciptakan Intelktual Desa untuk Indonesia Maju.....	56
Mahmud Yunus Mustofa, S.Pd.I., M.Pd.	



Epilog	67
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....	95
Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....	98



Gerakan Pemuda Desa: Gerakan Warga Biasa

Greg Sindana

Sejarah Gerakan Pemuda

Berbicara mengenai pemuda tak lepas dari sejarah gerakan pemuda. Tercatat dalam berbagai sejarah dunia, pemuda berperan menjadi penggerak perubahan, pendorong perubahan, sekaligus sumber energi perubahan. Ada begitu banyak gerakan pemuda yang signifikan dalam sejarah perjalanan bangsa kita, tetapi kali ini saya ambil saja tiga contoh gerakan pemuda yang berhasil mengubah tatanan Indonesia.

Awal abad ke-20 telah memunculkan gagasan awal tentang kebangsaan dan keindonesiaan. Kebangkitan dan pergerakan nasional ini tak lepas dari majunya pendidikan waktu itu akibat Politik Etis serta tumbuhnya organisasi-organisasi di berbagai bidang seperti politik, sosial, dan agama. Termasuk pula di dalamnya adalah komunitas-komunitas pemuda, seperti Jong Ambon, Jong Java, Jong Batak Bond, Jong Sumatra, Jong Islamieten Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Jong Celebes yang bersama-sama membayangkan nasionalisme dan kemudian mendeklarasikan persatuan dan kesatuan pemuda dalam Sumpah Pemuda di tahun 1928.

Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 membuat golongan pemuda mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu perintah dari Jepang. Perbedaan pandangan tentang waktu pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan pun terjadi. Golongan muda dengan sigap mendorong percepatan proklamasi kemerdekaan melalui sebuah aksi yang kita kenal dengan sebutan 'Peristiwa Rengasdengklok'. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia berhasil diproklamasikan.

Reformasi 1998 terjadi karena ribuan mahasiswa dari berbagai kampus ramai-ramai turun ke jalan dan menduduki gedung DPR/MPR selama berhari-hari untuk menuntut tumbanganya rezim Orde Baru dan mendesak agar Soeharto mundur. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatannya sebagai presiden setelah 32 tahun menjabat.



Begitu pentingnya pergerakan pemuda, Ki Hadjar Dewantara dalam rumusan pendidikan nasionalnya pun menempatkan pergerakan pemuda sebagai bagian dari Sistem Trisentra¹ atau Tri Pusat Pendidikan, di mana pendidikan diampu dan disokong oleh keluarga, sekolah formal, dan pergerakan pemuda. Pergerakan pemuda dipandang sebagai penyokong besar untuk pendidikan, baik yang menuju kecerdasan jiwa atau budi pekerti maupun yang menuju laku sosial², dan perlu diakui dan dimasukkan dalam rencana pendidikan.

Energi Muda yang Diredam

Meskipun demikian, gerakan pemuda pernah juga diredam pada masa Orde Baru. Pemuda-pemuda 'ditata dan dibina' dalam berbagai kegiatan pembinaan pemuda termasuk Karang Taruna. Pembinaan pemuda di masa Orde Baru cenderung ditekankan pada penanaman doktrin kebangsaan yang semu dan lebih diarahkan kepada nilai-nilai politik tertentu yang mengarah kepada salah satu partai politik tertentu.³ Gerakan kepemudaan difungsikan sebagai instrumen bagi rezim untuk melanggengkan kekuasaan. Organisasi-organisasi pemuda yang ada pun terus dibatasi dan diawasi gerak-geriknya.

Pada tahun 1970-an diberlakukanlah kebijakan normalisasi kampus dengan tujuan depolitisasi pelajar dan mahasiswa. Pelajar

1 Dewantara, Ki Hadjar. 1977a. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*, (Hlm. 70-74). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. .

2 _____ . 1977b. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*, (Hlm. 74). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

3 Harnawansyah, M. Fadhillah. 2020. *Sistem Politik Indonesia* (Hlm. 181).



dan mahasiswa tidak diperbolehkan terlibat dalam segala aktivitas yang berbau politik maupun diskusi-diskusi kritis. Di tingkat perdesaan, seluruh organisasi kepemudaan diindikasikan sebagai Karang Taruna yang pedoman dasarnya diatur dan diseragamkan di seluruh Indonesia.

Sebuah megaproyek pemerintah Orde Baru yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga transnasional untuk modernisasi pertanian pun digulirkan pada tahun 1980-an dengan judul besar “Revolusi Hijau”. Penerapan Revolusi Hijau di era Orde Baru dilakukan melalui program Bimas⁴ dengan semboyannya Panca Usaha Tani yang berisi: (1) penggunaan bibit unggul, (2) pemupukan, (3) pemberantasan hama dan penyakit, (4) pengairan, dan (5) perbaikan dalam cara bercocok tanam.⁵

Revolusi Hijau merusak begitu banyak tatanan desa. Petani tidak lagi berdaulat atas tanahnya sendiri. Revolusi Hijau memaksa petani menanam benih hasil rekayasa genetika sehingga menghilangkan ribuan bibit lokal. Belum lagi adanya anjuran pemakaian pupuk kimia yang dapat merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang serta skema kredit pupuk kimia dan pestisida yang memiskinkan petani. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mau lagi anaknya menjadi petani. Hal inilah yang kemudian turut mendorong tingginya angka urbanisasi pada medio 1980-1990-an, di mana pemuda desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota.

4 Program Bimas atau ‘Bimbingan Massal’ telah ada semenjak era Soekarno, tetapi baru memiliki kelembagaan yang mantap di era Soeharto, yakni dengan partisipasi aktif para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Institut Pertanian Bogor (Nugroho, 2018: 55).

5 Nugroho, Wahyu Budi. 2018. “Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru” (Hlm. 55).



Munculnya Kesadaran tentang Desa

Salah satu guru kami, Pak Damardjati Supadjar, seorang ahli filsafat Jawa dan Guru Besar Filsafat UGM, pada tahun 2012 berpesan kepada kami secara personal agar anak muda kembali ke desa karena desa adalah ibunya kota. Sejak saat itulah kami melakukan aktivasi nilai-nilai warisan di desa, antara lain musyawarah, gotong royong, dan “*ngelmu kelakone kanthi laku*” atau ilmu didapat melalui pengalaman nyata.

Nilai-nilai ini kemudian kami aplikasikan ala Ketjilbergerak dengan memproduksi musik, mural, video klip, festival, pameran seni, diskusi, dan lain-lain. Semua dilakukan dengan menggunakan bahasa anak muda dan digarap secara musyawarah, gotong royong, dan asyik. Suasana asyik perlu diciptakan agar anak muda merasa nyaman dan mau untuk terus berkarya agar kemudian bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini nantinya berujung pada karakter pemuda yang kreatif dan produktif. Karya seni di sini juga dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai media musyawarah dan gotong royong.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka desa berpotensi mengalami banyak perubahan. Salah satu poin Undang-Undang Desa yang disambut dengan pro-kontra adalah Dana Desa yang digelontorkan sejak 2015. Dana Desa tentu memberi begitu banyak dampak positif, salah satunya adalah mendorong otonomi desa sehingga desa dapat mengatur kebijakan dan anggarannya sendiri. Namun, beberapa permasalahan muncul sebagai akibat dari ketidaksiapan desa dalam mengelola Dana Desa.



Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa. Pada Desember 2017, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengatakan dari hampir 75 ribu desa di Indonesia yang mengelola Dana Desa, sekitar 200 di antaranya terkena operasi tangkap tangan (OTT)⁶.

Dana Desa terbukti telah membangun begitu banyak infrastruktur, memudahkan laju transportasi dan proses distribusi. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur di sisi lain juga memberi akses kepada industri-industri besar untuk dapat dengan mudah mengakses sumber daya alam yang tersimpan di desa. Warga desa berpotensi hanya menjadi penonton dari seluruh gegap gempita ini. Agar hal ini tak terjadi maka pemuda desa harus segera dibangun.

Kami pun mulai berkeliling ke desa-desa di Yogyakarta, Jawa Tengah dan blusukan ke desa-desa di berbagai provinsi di Indonesia. Kami bertemu dengan para pemuda desa, menyambung rasa, dan menjalin curhat sesama pemuda. Dari berbagai obrolan informal tersebut kami simpulkan ada dua masalah utama yang dihadapi pemuda desa. Pertama, pemuda desa merasa malu disebut sebagai 'anak desa' karena mereka merasa tidak pernah diarusutamakan dalam wacana pergaulan pemuda. Kedua, pemuda desa merasa tidak pernah dilibatkan di desa, dan walaupun dilibatkan hanya sebagai pelaksana teknis saja.

Sebagai bagian dari upaya solusi, kami berusaha menjawab dua permasalahan utama tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

6 Aziz, Abdul. 2017. "Pengelolaan Dana Desa:Kemenkeu Sebut 200 Desa Terkena OTT". *Tirto*, 19 Desember 2017, dilihat 1 Juli 2020. <https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa-kemenkeu-sebut-200-desa-terkena-ott-cB1V>.



1. Untuk menjawab permasalahan kepercayaan diri pemuda desa, dengan meminjam logika *branding*, kami me-*rebranding* dan membangun citra desa agar menjadi keren melalui pendekatan seni. Kami mulai memproduksi lagu, video klip, mural, berbagai produk kampanye kreatif, dan *merchandise* dengan tema desa. Proses pengkaryaan dilakukan dengan semangat musyawarah dan gotong royong.
2. Untuk menjawab permasalahan tidak dilibatkannya pemuda desa dalam pengelolaan desa dan pengambilan keputusan di desa, yang perlu kita tingkatkan adalah *posisi tawar pemuda desa*. Posisi tawar ini didapat melalui tiga hal, yakni pengetahuan, jaringan, dan karya nyata.

Dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa wahana yang telah kami bentuk bersama teman-teman pemuda desa, antara lain:

1. Sekolah Desa

Sekolah Desa adalah sebuah wahana pendidikan yang memerdekakan. Kurikulumnya dibangun secara partisipatif bersama pemuda desa sesuai konteks, potensi, dan permasalahan yang dihadapi di desa. Penyampaian materi dan gagasan di Sekolah Desa dilakukan dengan bahasa anak muda secara nonformal.

Pendanaan Sekolah Desa dilakukan secara mandiri dengan menjual *merchandise* berupa kaos yang saat ini sudah tersedia dalam empat desain. Hasil penjualan kaos ini seluruhnya masuk ke 'Kas Bergerak' yang dikelola oleh salah satu ketua pemuda desa. Nantinya, setiap desa yang menjadi tuan rumah Sekolah Desa dapat mengakses



‘Kas Bergerak’ sebesar satu juta rupiah yang akan digunakan untuk menyokong pelaksanaan Sekolah Desa.

Sekolah Desa dilakukan secara berkala dan berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain dengan sistem yang kami sebut *ngunduh*. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan ajeg untuk menciptakan kebiasaan belajar, membentuk kebiasaan bertemu dengan pemuda yang hidup di konteks desa lain sehingga muncul perasaan solidaritas senasib sepenanggungan. Kebiasaan berpindah-pindah ini juga membangun keluasan perspektif, terbiasa melihat perbedaan, dan membangun perasaan bahwa ‘aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar’.

2. Jaringan Pemuda Desa

Konsep ini mengacu pada konsep Tri Pusat Pendidikan-nya Ki Hadjar Dewantara, bagaimana pergerakan pemuda menjadi ruang pendidikan pemuda, ruang pendidikan yang memungkinkan pemuda desa membaca diri mereka sendiri dan lingkungan di mana mereka hidup, sebuah *peer to peer education*.

Jaringan Pemuda Desa juga berperan sebagai ekosistem bagi tumbuh kembang pemuda. Karena kami yakin karakter yang baik dibangun melalui ekosistem yang baik.

3. Sekolah Pemuda Desa & Festival Pemuda Desa

Bersama Kementerian Desa dan KPK kami membuat wahana pendidikan *Sekolah Pemuda Desa* yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017 dengan wilayah cakupan per provinsi. Wahana



pendidikan ini bertujuan untuk mendorong pemuda desa agar dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan dan penyerapan dana desa.

Kami juga membuat *Festival Pemuda Desa: Aku Bangga Jadi Anak Desa*, sebuah festival yang memamerkan beragam produk dan inovasi dari pemuda desa dari empat kabupaten yang ada di Yogyakarta serta mementaskan beragam kesenian desa, seperti tari dan musik oleh para pemuda desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memupuk kebanggaan dan meningkatkan posisi tawar pemuda desa.

Pandemi: Momentum Pemuda Desa

Tidak bisa dimungkiri, saat ini pandemi mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Begitu banyak tatanan yang selama ini kita pikir sangat kokoh ternyata hancur hanya dalam hitungan bulan diterpa pandemi. Industri besar mem-PHK ribuan pekerja, bahkan menutup perusahaan untuk selamanya.

Di kota, meskipun gotong royong antarwarga telah dengan sigap dilakukan terutama untuk membantu mereka yang paling rentan terdampak Covid-19, yaitu kaum miskin kota, tetapi bayangan menipisnya ketersediaan pangan di rumah masing-masing terus menghantui. Karena pemasukan sudah tak selancar beberapa bulan lalu maka untuk membeli bahan pangan harian, tabungan menjadi satu-satunya tumpuan. Hendak menanam tak ada lagi lahan. Jikalau ada lahan pun, meski tak luas, ternyata tak cukup punya pengetahuan menanam. Kota terjebak dalam sistem buataannya sendiri. Kita menjebak diri kita untuk tergantung pada



sistem yang tidak memandirikan diri kita sendiri. Ketahanan pangan kita tergantung pada industri dan pasar.

Pandemi ini sungguh menyadarkan kita bahwa ekosistem desalah yang paling siap dan paling tahan dalam menghadapi pandemi karena di desa masih ada tiga aset utama yang dimiliki desa, yaitu *air bersih, udara bersih, pangan sehat*. Ketiga aset utama desa inilah yang mengamankan desa dari pandemi dan bencana. Oleh karena itu, aset ini harus senantiasa terjaga dan dikelola sebagai kekayaan milik desa.

Jika pertanyaannya adalah siapa yang memiliki cukup energi, kreativitas, dan waktu untuk menjaga dan mengelola potensi desa maka jawabannya adalah pemuda desa. Momen pandemi ini seharusnya menjadi momen bagi pemuda desa untuk menata ulang perannya.

Menuju Desa yang Mandiri dan Berdaulat

Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemuda desa agar lebih siap berperan di desa. Yang pertama, ***membangun ekosistem pemuda yang mandiri***. Ekosistem yang mandiri dapat dicapai dengan membangun ketiga hal di bawah ini:

1. ***Sekolah Desa***, sebagai pendidikan yang memerdekakan dan kontekstual sesuai kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi pemuda desa di desa masing-masing.
2. ***Jaringan Pemuda Desa***, sebagai sebuah ekosistem yang mampu menjadi ruang tumbuh yang sehat bagi para pemuda desa untuk



menemukan dirinya sendiri, karena kami yakin ekosistem yang baik melahirkan karakter yang baik.

3. ***Lambung Data Desa***, adalah riset kolektif yang dilakukan bersama jaringan pemuda desa secara berkelanjutan. Para pemuda desa nantinya akan meriset dan mendokumentasikan berbagai hal di sekitar mereka di desa masing-masing, mulai dari pola konsumsi, ragam vegetasi, sejarah ruang, sejarah desa, dan seterusnya. Melalui *Lambung Data Desa* diharapkan jaringan pemuda desa secara bersama-sama dapat memproduksi pengetahuan sehingga di kemudian hari pemuda desa memiliki *lambung datanya sendiri*, yang dapat digunakan sebagai titik pijak gerakan dan inovasi di desa masing-masing. Riset semacam ini telah didahului oleh teman-teman pemuda Desa Gari, Gunungkidul (satu dari sekian desa yang tergabung dalam jaringan pemuda desa Yogyakarta). Mereka meriset pola konsumsi mereka sendiri, melibatkan 1094 KK. Dari hasil riset ini para pemuda Desa Gari kemudian melahirkan gerakan menanam di pekarangan dengan judul '*Omahku, Lambung Panganku*' atau '*Rumahku Lambung Panganku*'. Gerakan ini adalah kontekstualisasi dari konsep warisan yang ada di desa, terutama desa di Jawa, yaitu *karang kitri*, di mana pekarangan atau lingkungan rumah menjadi sumber ketahanan dan kedaulatan pangan.

Yang kedua, ***menjadikan desa sebagai Laboratorium Pemuda***. Dalam Kongres Kebudayaan Desa, gagasan inilah yang coba kami dorong dalam upaya pelibatan pemuda di desa, bagaimana agar di masa depan pemuda desa diberi ruang, diberi peran menjaga dan



mengelola tiga aset utama desa, yakni air bersih, udara bersih, pangan sehat. Desa dapat menjadi ruang eksperimen pemuda dan ruang untuk berkarya nyata, di mana pemuda desa bisa mengaplikasikan nilai '*ngelmu kelakone kanthi laku*'.

Untuk mencapai tujuan ini maka pemerintah desa harus dilibatkan secara aktif dan didorong agar keterlibatan pemuda ini masuk dalam kebijakan desa. Berangkat dari pemahaman terhadap aset utama desa, pemuda diharapkan mampu melakukan produksi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan desanya sehingga desa dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap produk-produk dari luar desa. Diharapkan di masa depan desa bisa lebih mandiri dan berdaulat baik dalam hal pangan, papan, maupun sandang.

Profil Penulis

Greg Sindana lahir dari keluarga guru, pegiat kesenian rakyat, dan kepala desa; menjadikan ia punya minat besar pada pendidikan, seni, dan desa. Sekitar 2006, saat masih mahasiswa, ia pernah mencurahkan gagasannya pada kertas fotokopian yang kemudian disebar di kampus. Selebaran tersebut dinamainya "Ketjilbergerak". Nama yang menggambarkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan berdampak besar. Pada perjalanannya, Ketjilbergerak kemudian berevolusi secara organik menjadi ruang belajar bersama yang cair dan independen dengan pendekatan seni. Karena bagi Greg Sindana, seni harus berdampak. Sehingga sepulang dari belajar singkatnya di The Hague Academy Belanda, ia berinisiatif



membuat “Sekolah Kota Sekolah Desa”. Sebuah wahana pendidikan bagi pemuda kota maupun desa yang independen, kontekstual, dan membebaskan. Hingga kini ia bersama Ketjilbergerak terus mengajak pemuda dari berbagai latar belakang untuk mempelajari masa lalu, masa kini, dan menyiapkan masa depan. Tujuannya untuk terus belajar bersama secara dialogis dan dialektis. Sehingga posisi tawar pemuda akan meningkat melalui penguatan jaringan dan memantapkan pengetahuan dengan metode ‘*ngelmu iku kelakone kanti laku*’.





Renungan Anak Petani di Desa, Kala, Patra: Tempat, Waktu, dan Keadaan.

Gede Robi Supriyanto

Bekal Hidup dari Keluarga

Sewaktu saya masih duduk di bangku SMP dan SMA, setiap libur Sabtu dan Minggu, saya selalu menghabiskan waktu di rumah kakek saya di desa. Desa yang sejak zaman Indonesia baru merdeka telah dikenal akan hasil pertaniannya. Sangat sejuk karena berlokasi di lereng Gunung Batukaru, gunung tertua di Pulau Bali. Di gunung ini pula terdapat mata air bagi sejumlah sungai besar yang

ada di pulau ini. Desa ini berada Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan Provinsi Bali.

Sehari-hari saya dan keluarga tinggal di Kota Denpasar. Jarak Denpasar dengan desa tempat kakek tinggal sekitar 80 kilometer atau dua setengah jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Awalnya saya merasa terpaksa menghabiskan liburan di desa karena sebenarnya saya pulang kampung untuk bekerja mengumpulkan uang sekolah, uang saku, dan keperluan pribadi lainnya. Ini adalah model pendidikan yang diterapkan oleh ayah saya kepada saya untuk mencari uang saku sendiri dengan cara memetik dan menjemur kopi, cengkeh, kakao, vanili, dan apa saja hasil kebun di kampung. Berapa pun uang yang saya kumpulkan dari pekerjaan tersebut itulah yang menjadi bekal saya sekolah serta tabungan uang hingga masa panen berikutnya.

Terus terang awalnya saya tidak suka dan cukup jengkel dengan perlakuan ayah saya ini karena saya merasa teman-teman seumuran saya di kota Denpasar bisa berlibur dan bermain di kota, sementara saya harus bekerja di kebun hingga kulit gosong di bawah terik matahari akibat setiap hari mesti menjemur hasil panen biji-bijian tersebut. Namun, semakin dewasa saya merasa bersyukur dan berterima kasih pada ayah saya atas hal ini. Pengalaman anak kota tinggal di desa bersama kakek dalam jangka waktu lama telah membuka perspektif baru yang membentuk pola pikir saya sejak saat itu hingga saat ini.



Di desa, saya tinggal di rumah kebun yang berjarak sekitar lima kilometer dari rumah kakek saya di pusat desa. Sementara kebun berada di bagian pelosok desa yang lebih terpencil lagi, berdampingan dengan hutan. Saya menghabiskan waktu selama tiga minggu berturut-turut tinggal di rumah kebun bersama kakek karena kami harus ikut terjun kerja sekaligus mengawasi langsung proses pemetikan hingga penjemuran hasil panen sebelum dijual dan diambil oleh pengepul/pelanggan kami.

Saya beruntung memiliki perspektif indah tentang kebun. Saya memandang kebun kakek saya seluas lima hektare tersebut bak pasaraya. Sehari-hari kami makan dari apa saja yang kami ambil dari kebun. Semuanya ada di sini: sayur, kacang-kacangan, rebung-rebungan, jamur, dan bumbu-bumbu beragam jenis yang tumbuh hanya beberapa langkah dari tungku dapur, tinggal petik dan masak.

Mau makan ikan, tinggal tangkap dengan bubu/perangkap ikan di sungai besar Tukad Telutuan yang melintas ke areal kebun. Di samping itu, karena di tepi hutan, beragam satwa liar sering nyasar masuk kebun. Hewan-hewan tersebut sejak turun-temurun oleh keluarga saya dipandang sebagai pasokan protein gratis. Ekosistem sawah di depan pondok menyediakan siput, kodok, belut, dan serangga lezat yang sepertinya tiada habisnya.

Nanas, pepaya, salak, wani, durian, manggis, langsung, jeruk, dan beragam beri-berian liar adalah camilan sehari-hari, saking banyaknya hingga tumpah ruah dan sering kali terbuang busuk sebagai kompos, mulsa, ataupun sebagai pakan ayam, kambing, dan babi peliharaan.



Di dalam kebun kami ada mata air pancuran yang mengucur sepanjang tahun sebagai sumber air bersih yang saya yakini memiliki kualitas lebih bagus daripada air mineral kemasan yang dijual di kios-kios di kota. Karbohidrat tinggal pilih, mau beras, ubi, talas, jagung, atau sukun, ada semua. Minyak goreng kualitas nomor satu, hasil perasan santan kelapa yang tumbuh di sepanjang bantaran sungai, mengukuhkan senandung lagu nasional wajib Indonesia: Rayuan Pulau Kelapa. Sementara air kelapa muda, asal mau panjat, tinggal minum kapan mau.

Kemewahan lain yang tak kalah penting adalah udara bersih bebas polusi di setiap napas yang kami hirup sepanjang hari. Setiap pagi bercangkir kopi hangat selalu tersedia di beranda pondok, dari biji kopi yang kami tanam sendiri.

Kakek dan paman saya juga menyadap nira enau untuk diproduksi menjadi tuak manis dan gula merah. Tuak manis bila difermentasi akan menjadi minuman beralkohol yang disebut tuak 'wayah' atau 'lau', sarana rekreasi serta hidangan untuk menjalin kekerabatan antarwarga desa sekaligus menjadi minuman probiotik lokal. Bila ada waktu lebih, tuak bisa disuling lagi menjadi arak, minuman beralkohol yang mengisi hampir semua kegiatan budaya di pulau ini. Sebuah kekayaan budaya turun-temurun yang selalu disuarakan di sela denting gelas setiap petang, yang mengantar canda dan kisah tentang rumpun bangsa ini sebagai penyadap nira jauh sebelum republik ini berdiri.

Keberagaman pangan yang terhidang di meja makan adalah refleksi dari keberagaman hayati yang ada di kebun kami. Serupa



dengan kayanya keberagaman bahasa, suku, ras, dan budaya bangsa ini .

Kekayaan ini adalah aset Indonesia. Saya dengan percaya diri menyetujui bahwa keanekaragaman inilah “*nation branding*” negara kita sesungguhnya.

Saya ingin anak cucu saya kelak mewarisi perspektif ini. Saya ingin anak-anak sekolah, sejak level sekolah dasar, diajarkan tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Saya ingin para pemimpin bangsa dan pembuat kebijakan melindungi aset dan kekayaan-kekayaan ini dan menjadikannya skala prioritas di agenda percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran rakyat. Saya ingin pemuda desa sadar bahwa mereka adalah orang-orang kaya dan sadar jika desa kuat maka negara ikut kuat.

Sekarang kakek sudah meninggal dan warisan ini jatuh ke tangan ayah saya. Ayah saya langsung menyerahkannya ke saya karena dia percaya saya akan merawatnya dan tidak akan menjualnya.

Kekayaan yang Terlupakan

Bencana Pandemi Covid-19 memrakporandakan ekonomi, bukan hanya Indonesia tapi global. Kita terpaksa “dirumahkan”. Namun, setiap masalah selalu ada hikmahnya. Menghabiskan banyaknya waktu di rumah membuat kita memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, melihat ke dalam dan menjadi kreatif untuk bertahan. Kita mulai mengamati potensi apa saja yang ada di sekitar kita dan memetakan nilai-nilai yang ada. Seiring munculnya masalah, secara paralel muncul sejumlah solusi.



Dampak pada setiap orang berbeda-beda, sesuai dengan wilayah tempat tinggal, bidang pekerjaan, jumlah penghasilan, serta hubungan keluarga dan pertemanan. Masyarakat urban dengan pendapatan harian dan kebutuhan sehari-hari bergantung pada apa yang tersedia di warung, pasar, atau swalayan jauh lebih terdampak secara ekonomi dan kualitas hidup dibanding dengan masyarakat petani yang tinggal di pedesaan.

Di Bali, industri pariwisata dan hiburan, termasuk *event*, menjadi sektor yang paling terpuruk. Untuk saya yang juga berprofesi sebagai musisi, pemasukan uang jauh berkurang, tetapi di sisi lain ada waktu luang yang bertambah. Baik itu waktu bersama keluarga, waktu untuk kesehatan diri sendiri, waktu istirahat, ataupun waktu kreatif untuk memberdayakan apa saja yang ada di sekitar, serta mengingat-ingat bakat terpendam, menggali kemampuan dan potensi yang terlupakan.

Salah satu hal yang saya lakukan adalah memanfaatkan sebanyak mungkin lahan kosong di sekitar rumah untuk bercocok tanam tanaman pangan. Kebun rumah sudah ada sejak dulu, tetapi waktu luang selama pandemi menyediakan lebih banyak kesempatan untuk menggarap kebun.

Di era pandemi ini, bagian-bagian yang retak dan rapuh pada sistem semakin terlihat jelas. Ketergantungan pada impor akan barang-barang vital, seperti bahan pangan menjadi hal yang sangat rentan. Berkurangnya lahan-lahan produktif akibat alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi stok pangan. Kekuatan yang ada di masyarakat juga muncul. Di saat semua dianjurkan untuk jaga



jarak (*social distancing*), justru solusinya muncul di hal kekerabatan sosial dengan maraknya urunan, bantu-membantu dengan semangat gotong royong. Bergesernya skala prioritas dan kesadaran akan potensi yang terlupakan sekonyong-konyong muncul ke permukaan.

Di awal pandemi, sekitar awal Maret, sempat terjadi krisis bahan-bahan sanitasi seperti *hand sanitizer*. Waktu itu semua apotek dan pasaraya yang saya kunjungi kehabisan stok barang ini. Kondisi ini membuat saya gusar. Kok bisa? Sesusah apa sih produksi *hand sanitizer*? Kenapa bisa langka, apalagi di saat-saat paling dibutuhkan seperti saat itu?

Kopernik, organisasi nirlaba tempat saya bekerja, saat itu membentuk tim tanggap darurat bencana terkait pandemi. Agenda utamanya adalah pengadaan APD serta barang-barang sanitasi yang dibutuhkan paramedis di Bali secara cepat, salah satunya adalah pengadaan *hand sanitizer*. Tanya sana-tanya sini, *googling* sana-sini, diketahui bahwa salah satu kabupaten di Bali, yaitu Karangasem, memiliki sekitar 1000-an petani dan pengrajin arak yang tersebar di wilayah kabupaten ini. Ketersediaan alkohol sebagai bahan utama *hand sanitizer* ternyata cukup melimpah.

Pesanan awal Kopernik berupa alkohol 70 persen (membutuhkan penyulingan hingga 3 kali dari arak tradisional untuk kebutuhan arak minum yang biasanya hanya disuling sekali) sebanyak 500 liter terpenuhi secara cepat, melibatkan sekitar 50-an petani dan pengrajin arak. Pemesanan dilanjutkan. Kopernik memesan lebih banyak lagi, sekitar 2500 liter. Semuanya mampu dipenuhi secara tepat waktu dan konsisten secara kualitas.



Setelah Kopernik memiliki bahan baku ini, kami bekerja sama dengan dua *brand* industri rumah tangga lokal: Utama Spice dan Embun Natural (yang keduanya berlokasi di dekat kantor Kopernik dan sudah cukup lama berkecimpung di usaha kosmetik berbahan alami). Dari kedua perusahaan ini, bahan baku etanol 70 persen ini disulap menjadi *hand sanitizer* kualitas standar beraroma serih.

Agar distribusi tepat sasaran, Kopernik bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, yang memetakan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan posko Covid-19 di seluruh pulau Bali. Selain itu, kami juga mendistribusikan langsung ke wilayah pelosok yang pastinya juga membutuhkan ketersediaan barang-barang ini.

Kegiatan ini berjalan sepanjang masa pandemi, mengikutsertakan lebih dari 200 tenaga kerja, dan menggalang dukungan lebih banyak dari berbagai pihak. Salah satu perusahaan minuman beralkohol, Diageo, yang pabriknya ada di Bali turut menyumbang 10.000 liter etanol 70 persen sebagai bahan baku *hand sanitizer* sehingga total ada 13.000 liter bahan baku yang dimanfaatkan.

Inspirasi dari kearifan lokal, dengan jaringan kolaborasi lintas sektor: petani, pengrajin, pengusaha, relawan, dan pemerintah adalah inti dari kegiatan ini. Ini hanya satu contoh dari kisah inspirasi lokal dan kolaborasi yang saya alami langsung di masa pandemi. Saya yakin ada segudang ragam kisah-kisah lainnya yang bertebaran di luar sana.

Budaya Bali adalah Budaya Pertanian.

Saya bersyukur dan merasa beruntung lahir, tumbuh, dan besar di Bali. Lingkungan yang sangat kontras sebenarnya. Di satu sisi,



Bali adalah berandanya Indonesia, pintu masuk arus internasional karena industri pariwisata adalah tulang punggung ekonomi daerah ini. Bali adalah *melting pot*, tempat berkumpul manusia dari beragam asal dan latar belakang. Interaksi multikultural ini memengaruhi cara berpikir kami menjadi lebih terbuka dengan pengaruh dan informasi apa pun. Wawasan menjadi lebih terbuka dengan perbedaan.

Sementara di sisi lain, Bali masih menjunjung tinggi dan sangat bangga dengan adat dan budaya lokalnya. Kehidupan masyarakat adat di Bali bukan hanya sekadar kosmetik atau kostum yang keluar di peringatan 17 Agustus atau hari spesial perayaan adat nusantara, tetapi adat di Bali adalah napas kehidupan sehari-hari manusia Bali berinteraksi dan beraktivitas. Siapa pun mereka, setiap orang Bali memiliki fungsi dan tanggung jawab di dalam masyarakat adat, dan setiap warga yang tinggal di Bali wajib mematuhi hukum adat di wilayah masing-masing, yang menurut pengamatan saya, kekuatan hukum adat di Bali sama kuat dengan hukum formal/resmi.

Menjejakkan kaki di atas 2 hal ini: satu sisi sangat terbuka dan global, sementara di sisi lain sangat tradisional dan lokal, memberi perspektif yang unik bagi siapa saja yang tumbuh dalam budaya di lingkungan seperti ini. *“Think global, act local”* mungkin definisi yang cukup tepat untuk pengaruh positif yang didapat bagi siapa pun orang Bali yang mampu melihat ini sebagai keuntungan.

Masyarakat Bali sangat bangga dengan budayanya. Mungkin karena terlalu sering dipuji turis sehingga banjir apresiasi dari luar ini turut berkontribusi pada pelestarian budaya. Bali punya banyak ideologi universal, satu di antaranya adalah *Tri Hita Karana*,



yaitu sebuah kondisi ideal akibat terciptanya keseimbangan dan keharmonisan tiga hubungan: hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan pencipta. Mungkin itu pula yang memengaruhi apa pun konsep aturan yang diciptakan untuk Bali, termasuk konsep di bisnis pariwisata Bali, yaitu pariwisata “Alam” dan “Budaya”. Karena dua hal ini erat kaitannya dengan filosofi *Tri Hita Karana* tersebut.

Bicara tentang budaya Bali sangat erat kaitannya dengan kebudayaan petani. Isi Kalender Bali—yang menjadi acuan masyarakat adat Bali dalam melaksanakan kehidupan ritual sehari-hari, termasuk di dalamnya menyangkut karakter manusia berdasarkan hari lahir, tanggal upacara, primbon atau hari baik, serta karakter alam berdasarkan tanggal dan pengaruh posisi planet, bulan, dan matahari—bila ditelaah, sebagian besarnya memuat kebutuhan dalam kebudayaan petani masyarakat Bali, yang meliputi perlakuan dan perayaan untuk tumbuhan, ternak, perkakas tani, dan irigasi. Begitu pula dengan material sesajen/persembahan yang dihaturkan di hampir semua hari raya di Bali. Seluruh material utamanya adalah material hasil kebun berupa buah-buahan, dedaunan, biji-bijian, tanaman obat, beragam bunga, serta air (tirta) sebagai komponen utama.

Saya pernah mengamati *Daksina*, sebuah bentuk kreasi sederhana yang sering melengkapi *Yadnya*/persembahan pada upacara-upacara di Bali, baik itu pada upacara-upacara kecil skala rumahan ataupun upacara-upacara besar skala desa. *Daksina* berwujud sebuah wadah beralas melingkar, sering kali berbahan janur yang di dalamnya ada berbagai macam hasil kebun. Batok kelapa



tua utuh, beras, biji-bijian dan benih rupa warna, telur (sering kali telur itik), pisang, tebu, bahan bumbu seperti kemiri dan kluwek, bahan obat-obatan seperti sirih dan pinang menjadi unsur-unsur utama saat saya membongkar isi jeroan dalam paket *Daksina* ini. Jika makna benda-benda tersebut kita tanyakan ke para tetua atau kita cari maknanya lewat *Google*, maka informasi yang kita peroleh sering kali sebatas bahwa benda-benda tersebut sebagai simbol ini dan itu.

Bagi saya sebagai orang yang hobi bertani—melihat bahwa sebagian besar benda-benda ini adalah berbagai jenis bibit yang siap ditanam kembali—saya menerka, jika kita, si pembuat sesajen, diharapkan memiliki tanamannya agar di setiap upacara kita memiliki akses yang mudah untuk memanfaatkan hasil-hasil tanaman itu kembali. Bahkan saya menganggap bahan-bahan upacara ini sebagai metode konservasi benih, pemuliaan benih, yang apabila ditanam kembali sehabis upacara, justru akan memperbanyak dan melestarikan bahan-bahan tersebut.

Saya mengamati jika jenis-jenis tanaman yang dipakai di *Daksina* adalah tanaman-tanaman yang cukup penting yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan kesehatan/medis di masyarakat. Sementara telur mewakili ternak yang menjadi hal penting dalam pangan masyarakat dan sangat vital manfaatnya jika diintegrasikan ke dalam sistem pertanian berkelanjutan. Adanya benang tукelan sebagai simbol tiga naga: Basuki, Ananta Boga, dan Taksaka dalam *Daksina*, yang mewakili Air, Tanah, dan Udara sebagai elemen penting yang menunjang kehidupan di planet bumi. Elemen utama yang menunjang tempat pangan kita berasal.



Kemakmuran yang disimbolkan dalam satu wadah. Bahwa kemakmuran berhubungan erat dengan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan bergantung erat dengan ekosistem alam yang sehat seimbang. Dari sini saya sering bertanya-tanya tentang kegiatan ekonomi kita saat ini. Sudahkah kita melakukan tindakan ekonomi yang baik, benar, dan tepat?

Karena yang saya pelajari dari budaya saya sendiri, saya menyimpulkan bahwa tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan. Dan yang paling pokok dari yang pokok adalah pangan. Sementara semua pangan kita tumbuh dari alam; dari tanah, dari air, dari udara.

Jadi menurut saya, tindakan ekonomi yang dilakukan dengan merusak atau menghancurkan alam: tanah, air, dan udara adalah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham atau tidak peduli apa itu ekonomi. Tindakan egois dan serakah yang hanya mementingkan keuntungan di hari ini saja dan untuk dirinya saja, bukan untuk orang banyak dan keberlanjutan di masa depan.

Harapan saya bagi manusia adalah bahwa setiap manusia, siapa pun itu, selalu ada cahaya kebaikan di dalam dirinya. Tinggal sekarang dia memilih, apakah cahaya itu dimanfaatkan untuk menerangi dunia saat dia masih menyala, sebelum cahaya itu akhirnya redup saat Sang Jasad kembali ke alam: ke tanah, air, dan udara.



Profil Penulis

Gede Robi Supriyanto lebih bangga disebut sebagai petani organik meski dalam kesehariannya ia juga seorang musisi yang rutin berdendang dari panggung ke panggung. Ia merupakan vokalis, gitaris, sekaligus pendiri band Navicula dari Bali. Konsentrasinya pada pertanian organik tak lepas dari kesadarannya pada kepedulian sosial dan lingkungan. Tak heran jika lagu-lagu Navicula banyak mengangkat tema tentang kondisi alam dan lingkungan, jauh sebelum beragam isu lingkungan jadi isu arus utama seperti sekarang. Perjuangannya pada konservasi dan kelestarian lingkungan disuarakan lewat lagu, yang kemudian menjadi anthem bagi para aktivis lingkungan. Pada 2016, Robi mewakili Indonesia dalam Asia 21 Young Leader yang diselenggarakan oleh Asia Society. Ia hadir di sana untuk berbagi pengalamannya sebagai petaniii organik. Sebelumnya, ia mendirikan band Navicula pada 1996. Robi dan teman-temannya juga sempat mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat “Bali Ecotourism Care” agar bisa lebih intens dan berjejaring dengan organisasi lain yang konsentrasi pada lingkungan. Bahkan tiap ada kesempatan kerelawanan lingkungan, mereka selalu berusaha bergabung untuk memperkaya pengalaman.





Menyambut Anak-Anak Muda Kembali ke Desa

Iqbal Aji Daryono

Andai wabah ini tidak datang menghajar kita, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa kota-kota dan segenap gemerlapnya adalah monster plastik yang amat rapuh. Tapi sekarang kita memandangi layar cerita yang menunjukkan bahwa ketika gerak gelombang manusia berhenti, mesin-mesin akan ikut berhenti, aliran angka-angka di rekening berhenti, dan jutaan *magic com* juga turut berhenti.

Inilah masa ketika kita menjadi saksi atas entah berapa ribu orang yang berduyun-duyun pulang, meninggalkan harapan yang kandas di sela gedung-gedung besar, mengabaikan pagar-pagar protokol kesehatan pencegahan malapetaka, semata karena tak banyak lagi yang bisa dinanti di antara berbagai jenis perangkat yang berhenti menyala.

Kembali ke desa, Mas, Mbak. Mari kembali ke desa.

“Minimal kalau di kampung ada yang bisa dimakan,” kata orang-orang yang memaksa pulang. Ya, ternyata di kampung memang masih ada yang bisa dimakan. Ada sawah, ada umbi-umbian dan dedaunan, ada tetumbuhan yang rimbun menyenangkan, ada tetangga dan sanak saudara yang mungkin tidak terlalu penuh perhitungan.

“Kalau memaksa tetap di kota, saya bisa mati. Tapi di desa, minimal kami tidak mati,” begitu suara lainnya. Sepertinya suara itu memang benar. Kalau tidak benar, lalu kenapa orang-orang itu tetap memaksa diri untuk pulang?

Dengan kenyataan yang terang benderang, agaknya sebuah momen magis memang telah datang. Desa-desanya menggeliat, bersiap untuk kembali bangkit. Anak-anak muda mulai menjalankan apa yang dijalankan kakek-nenek mereka, tetapi selama ini selalu mereka abaikan: menanam.

Ya, menanam. Seiring dengan meledaknya tren mengayuh sepeda lipat yang nyaris tak masuk akal itu, ada kegairahan baru untuk menanam. Ada anak-anak muda yang bergerak memburu



lahan tidur untuk menanam, membangun model-model medium alternatif untuk menanam, berbarengan dengan grup-grup *whatsapp* yang berisi mereka yang berbagi semangat untuk kembali menanam. Menanam benih-benih baru, menanam semangat-semangat baru, menanam gambaran dunia yang juga baru.

Tentu aktivitas menanam kali ini juga lahir dari jenis yang baru. Apa saja yang ditanam, bagaimana caranya menanam, juga seperti apa memaksimalkan nilai dari hasil tanam, semuanya mulai menampakkan kebaruan demi kebaruan.

“Dari dulu pemuda desa maunya ya ke kota. Sebab di kota ada uang. Kalau tetap tinggal di desa, tugasnya cuma ronda dan buka-tutup portal gang, atau maksimal jadi panitia tujuh belasan. Apa nggak ada yang lain yang lebih produktif, taktis, dan strategis? Lihat, sekarang di desa juga ada uang, meski tentu saja yang kita cari bukan cuma uang!”

Baru tiga hari lalu, seorang kawan saya, pegiat desa yang militan dan berapi-api, mengomel demikian. Itu tentu omelan yang bukan sekadar omelan. Di situ ada kegelisahan, kejengkelan, bahkan kemarahan. Masalahnya, kepada siapa kemarahan itu ditujukan? Kepada negara? Ah, lagi-lagi kok negara. Negara sedang sibuk dengan tugas-tugas penyerapan anggaran.

Saya kaget menyimak omelan kawan saya, melihatnya terlalu heroik dan terlalu gegap gempita, meski kemudian diam-diam saya akui saya membenarkannya. Betul juga, betul juga. Buat apa anak-anak muda itu memaksa diri menyusul para seniornya berangkat ke kota-kota?



Toh, bekal fase sejarah untuk menjalankan yang heroik-heroik itu sudah lumayan. Ini zaman internet, Saudara! Dengan internet, bahkan batas-batas negara bisa dilompati, apalagi cuma batas antara desa dan kota. Dengan internet, informasi dan pengetahuan yang dulu kala cuma bisa didapatkan hanya dengan datang ke kota, kini sudah bisa dijumpai tanpa menggeser pantat sesenti jua.

Tak cuma itu. Dengan internet, kabar tentang apa pun yang dijalankan dan disediakan para pemuda itu bisa disebarkan sejauh-jauhnya dengan seketika. Dan dengan internet, ada jalur-jalur ekonomi yang bisa dipintasi, ada mata rantai panjang pedagang rakus yang bisa dibabat dan dikepras, ada sumur-sumur kehidupan baru yang limpahan airnya bisa selalu dinanti-nanti.

Semua itu sebenarnya cukup. Syaratnya, ada banyak hal yang mesti terlebih dulu dimantapkan. Bahkan mungkin kita harus merombak paradigma dalam memandang satu hal yang paling mendasar: pendidikan.

Dulu pendidikan dasar dirancang sekian tahun, dilanjutkan pendidikan menengah, kemudian sekian tahun lagi di perguruan tinggi. Apa orientasinya? Tentu saja ada orientasi akademis-keilmuan di sana. Namun lebih dari itu, diam-diam porsi yang jauh lebih besar dalam sistem persekolahan yang kita jalankan adalah merakit dan menyiapkan jutaan tenaga yang akan bergerak memutar roda-roda industri. Pendidikan kita memang berorientasi industri, menyiapkan apa yang selalu disebut di halaman-halaman *leaflet* sebagai “SDM yang siap memasuki dunia kerja”.



Pertanyaannya, dunia kerja seperti apa? Tentu saja dunia kerja di kota-kota. Namun, apakah dunia kerja di desa mensyaratkan pendidikan selama dua puluh tahun lamanya? Rasanya kok tidak ya. Alih-alih mematangkan para anak muda dengan kemampuan siap kerja, pendidikan yang berlarut-larut sebagaimana yang selama ini kita jalani bisa-bisa malah menjadi alat paling efektif untuk membuang waktu secara sia-sia.

Kita selalu berbangga diri dengan bonus demografi. Para pemuda usia produktif konon berlimpah jumlahnya. Problemnnya, yang kita banggakan itu jumlahnya atau produktivitasnya? “Jika sebagian besar di antara jumlah itu adalah mereka yang menghabiskan dua puluh tahun hidup untuk terus bersekolah, dengan ilmu yang belum tentu mereka butuhkan dan belum tentu bermanfaat bagi lingkungan, dan setelah itu produktivitas baru diwujudkan hanya setelah ijazah sarjana ada dalam genggamannya, sebenarnya mereka itu bonus demografi atau beban demografi?”

Masih mendenging di telinga saya suara serak seorang resi penunggu lereng Merapi. Jadi kita ini bonus demografi atau beban demografi? Nyelekit sekali. Menusuk sekali. Saya kepingin sakit hati.

Namun, setelah saya pikir-pikir memang saya sendiri pun jenis manusia yang terlalu lama sibuk di bangku kuliah, terlalu lama menjadi beban orang tua dan beban subsidi negara, untuk ilmu yang tidak saya gunakan, untuk sekian tahun waktu yang saya sia-siakan. Jadi, terus terang saya memang cukup lama menjadi beban demografi dan itu tak bisa saya sangkal lagi.



Itu baru sisi pendidikan terkait dengan orientasi “kerja di mana” dan terkait alokasi waktu yang panjang itu. Belum lagi tentang konsep dan idealisasi tentang apa yang menarik dan apa yang tidak menarik, hal-hal seperti apa yang layak dicita-citakan dan hal-hal semacam apa yang tidak dicita-citakan.

Pendidikan pada akhirnya adalah penyajian atas referensi-referensi. Baik melalui pendidikan di rumah alias di keluarga maupun di institusi resmi bernama sekolah.

Di rumah, di keluarga, di lingkungan selalu ada nilai-nilai yang ditanamkan baik sadar maupun tidak. Dan khusus soal ini, masyarakat pertanian di desa-desa di Jawa punya sesuatu yang rumit dan sulit diputus, yakni penghormatan tertentu atas derajat kaum priayi.

Dalam struktur masyarakat Jawa klasik, dulunya kaum priayi adalah mereka yang berdarah biru, trah keraton Mataram dan anak turunnya. Namun, kemudian muncullah kalangan priayi alit. Mereka menjadi priayi bukan atas dasar keturunan, melainkan dari mobilitas yang bisa diupayakan. Persisnya, ketika ada kalangan kawula yang berhasil menduduki pekerjaan-pekerjaan kerah putih yang disediakan oleh pemerintahan kolonial.

Pendek kata, mereka adalah pegawai pemerintah. Dan dengan keberadaan kalangan baru tersebut, muncullah satu gambaran bahwa kepriayian bukan lagi semata takdir, melainkan satu derajat yang bisa diikhtiarkan. Ini peluang lompatan kasta yang sangat menggiurkan bagi kalangan jelata. Terdongkraknya martabat keluarga akibat anak atau cucu jadi “pegawai” alias jadi “priayi”, akhirnya menjadi konsep pergeseran status sosial yang dicita-citakan.



Hal ini terus mentradisi, sampai kemudian pemerintahan kolonial hengkang, bahkan sampai di masa kini ketika yang disebut “pegawai” itu bukan lagi sebatas pegawai pemerintah, melainkan apa pun yang kerahnya putih dan pekerjaannya “tangan bersih”.

Ya, masyarakat agraris Jawa adalah masyarakat yang mengharapkan diri untuk keluar dari jebakan takdir sebagai kawula, dan dari situ pelan-pelan mereka melucuti anak-cucu mereka dari aktivitas yang telah mereka jalankan ratusan tahun, yaitu bertani. Bertani hanyalah cara mereka bertahan hidup, bukan pengabdian sepanjang hayat. Maka jangan heran kalau banyak keluarga di masyarakat pertanian Jawa rela melepaskan lahan produktif mereka untuk diubah bentuknya menjadi uang ratusan juta dan uang itu disulap lagi menjadi status pekerjaan anak-anak mereka. Entah untuk “pelicin” buat masuk sebagai pegawai Pemda, sebagai guru, atau sebagai tentara.

Pekerjaan-pekerjaan semacam itulah yang diidealkan. Yang tidak berpeluh, yang tidak berlumpur, yang tidak berdebu, dan yang membuat lingkungan kiri dan kanan merasa segan. “*Dudu perkara dhuwite, tur luwih kajen, Le.*” Bukan melulu soal uang, tetapi ini lebih ke perkara martabat di tengah pergaulan sosial.

Nah, dengan alam pikiran seperti itu, masihkah kita bisa membayangkan bahwa anak-anak muda akan rela menetap di desa, mengolah sawah, lalu orang tua mereka akan berwasiat sebelum sekarat, “Nak, belajarlah yang tekun, biar besok jadi petani melanjutkan dharma leluhurmu?” Ngimpi, Mas. Ngimpi.

Belum lagi bentukan lingkungan pendidikan formal di sekolah-sekolah. Kita tahu orientasi sekolah “modern” adalah industri dan



kantong-kantong industri bersemayam di kota-kota. Dengan model seperti itu, iklim regenerasi seperti apa yang bisa dibayangkan? Tentu saja para senior yang sukses dan selalu diceritakan oleh para guru mereka kepada adik-adik kelas adalah mereka yang berhasil bekerja di kota, menjadi pejabat di sana dan sini, menjadi direktur di perusahaan A dan firma B, menjadi dokter di rumah sakit X dan Z, dan sejenisnya. Pendek kata, mereka yang menjadi para priayi.

“Anak-anak, ini salah satu alumnus teladan sekolah kita. Setelah lulus dari sini dia melanjutkan pekerjaan bapaknya dengan mengembangkan sawahnya, sembari beternak kambing.”

Adakah kalimat seperti itu diucapkan guru-guru? Rasanya satu banding seribu, atau bahkan satu banding seratus ribu. Dan semua itu membangun alam berpikir anak-anak muda di desa-desa, membentuk konsep ideal kehidupan mereka selama entah berapa masa.

Nah, lapis-lapis benteng kokoh seperti itulah yang semestinya terlebih dahulu didobrak oleh siapa pun yang berencana mengajak anak-anak muda untuk kembali ke desa, sembari menegaskan kembali bahwa kehidupan, kemandirian, dan kemampuan untuk terus bertahan itu ada di desa, bukan di kota-kota yang hanya mampu menyediakan status priayi tanpa mampu menyediakan berkarung-karung padi.

Memang ini jalinan perkara yang sangat rumit. Meski demikian, momentum hantaman wabah ini adalah kesempatan yang mesti diambil dan dibuka sebagai jalan. Sembari mempersiapkan seberapa



luas jalan yang akan kita buka, izinkan saya mengekor kawan saya tadi. Saya ingin menyimak dia yang sedang mengajak anak-anak muda di desanya untuk tidak cuma sibuk membuka-tutup portal kampung dan menjaga pos ronda.

Profil Penulis

Di beberapa kesempatan, Iqbal Aji Daryono mengaku bingung harus menyebut dirinya sebagai apa. Karena pihak yang mengundangnya di beragam acara sering menyematkan berbagai label untuknya. Mulai dari pegiat media sosial, penulis buku, hingga kolumnis. Ia memang aktif di media sosial terutama Facebook dengan puluhan ribu pengikut akun Facebooknya. Disebut penulis buku karena ia telah menulis beberapa buku. Buku laris *Out of the Truck Box*, berkisah tentang pengalamannya menjadi sopir truk saat ia dan keluarga tinggal di Perth, Australia. Ada pula buku *Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira*. Buku yang memaparkan ekspresi berbahasa yang lahir dari keseharian, baik dari obrolan maupun media massa. Sedang cap kolumnis ia dapat karena aktif menulis kolom di beragam media. Seperti *Detik.com*, *Mojok.co*, dan *Jawa Pos*.





Peran Pemuda dalam Menghadapi Tatanan Baru Imbas Pandemi Covid-19¹

Adung Abdul Rahman

Isu penguatan desa di tengah pandemi Covid-19 merupakan isu penting. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, terdapat beberapa pertanyaan yang harus diajukan untuk bisa menjadi acuan bagi hal-hal yang harus dilakukan berikutnya.

Benarkah pandemi Covid-19 memang mendekonstruksi tatanan kehidupan masyarakat desa? Atau apakah ini hanya sekadar

¹ Disarikan oleh Fiqih Rahmawati

instruksi dari sejarah kehidupan kita untuk terus melakukan perubahan?

Selama pandemi Covid-19 menyerang umat manusia secara global, kita bisa melihat beberapa hal yang kemudian berubah. Termasuk kampanye *new normal* yang saat ini digencarkan oleh pemerintah, adaptasi terhadap kebiasaan baru, dan lain sebagainya. Bagi beberapa orang perubahan ini mungkin terasa drastis, tetapi bagi yang lain perubahan ini tak begitu terasa.²

Perubahan yang berkaitan dengan pola hidup baru ini tidak terlalu terlihat di tempat-tempat kecil seperti desa. Di desa Karangampel, Indramayu, tempat saya tinggal, saya melihat masyarakat di sekitar terlihat normal seperti biasanya. Mereka tidak serta-merta mengikuti imbauan-imbauan dari pemerintah yang salah satunya menggunakan masker. Kehidupan di desa ini dijalani dengan cara hidup yang sama seperti 10-15 tahun yang lalu sebelum adanya virus Corona. Masyarakat di sini menjalani hidup seperti biasa, meskipun Covid-19 sudah mengancam semua aspek kehidupan.

Di sisi lain, ada perubahan yang mungkin akan terjadi dalam jangka panjang yang akan kita jalani dalam waktu lama.

Saya menggambarkan ini seperti masa-masa di bulan Ramadan, di mana ada *Big Ramadan*, yang berbeda dari sebelas bulan yang lain. Di bulan Ramadan yang besar ini, semua umat Muslim terlihat lebih santun, tidak saling terobos di jalan, dan semua orang saling berbagi makanan dengan sesamanya karena bulan Ramadan memang bulan

2 Pranita, Ellyvon, Sri Anindiati Nursastri (ed.). 2020. "Ahli Sebut Corona Bisa Menular Lewat Mikrodroplet, Butuh Jaga Jarak 6 Meter". Kompas, 29 April 2020, dilihat 9 Juli 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/29/180200223/ahli-sebut-corona-bisa-menular-lewat-mikrodroplet-butuh-jaga-jarak-6-meter>.



yang istimewa dengan pahala yang berlipat ganda bagi setiap amal ibadah yang dilakukan.

Lantas apakah pandemi ini juga memiliki haluan semacam itu dengan perubahan ke arah lebih baik atau justru ke arah destruktif?

Perubahan yang terjadi, imbas pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020 lalu, wabah virus Corona ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) yang disampaikan secara resmi oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mengutip dari *National Geographic*,³ Tedros menyebutkan bahwa penetapan status pandemi ini tidak akan mengubah bagaimana cara virus ini bekerja, tetapi hal ini akan mengubah upaya negara di dunia untuk menanganinya.

Perlu kesadaran secara kolektif bahwa Covid-19 membawa dampak masif. Beberapa sektor kehidupan yang terdampak pun harus beradaptasi dengan strategi lebih efektif. Saya melihat beberapa perubahan ke arah lebih baik imbas dari pandemi ini, di antaranya tren digital yang semakin banyak digunakan, kemampuan individu untuk menahan diri, aktivitas berpusat di tempat tinggal masing-masing, hingga meningkatnya solidaritas sosial di masyarakat.

Selama pandemi berlangsung, jaga jarak merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus dilakukan, mengingat virus ini dapat menular melalui percikan *droplet* yang dapat menjangkau jarak 1,5

3 Widyaningrum, Gita Laras. 2020. "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?". *National Geographic*, 12 Maret 2020, dilihat 9 Juli 2020. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>.



hingga 2 meter. Penelitian terbaru dilansir dari *Kompas* menyebutkan bahwa Covid-19 dapat menular melalui *microdroplet* yang berukuran lebih kecil. Percikan dari *microdroplet* mampu menjangkau jarak hingga enam meter atau lebih.

Untuk meniasati hal ini, pemanfaatan instrumen digital menjadi tren yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, mengingat instrumen digital yang memanfaatkan teknologi internet ini mampu melipat ruang dan waktu. Pemanfaatan teknologi digital dimulai dari perkantoran dengan mengubah sistem kerja di kantor menjadi *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah, pembelajaran jarak jauh di bidang pendidikan hingga layanan umum memanfaatkan teknologi internet. Idulfitri yang lekat dengan tradisi mudik dan halalbihalal pun berubah untuk mencegah penularan Covid-19. Mudik digantikan *video call* bersama keluarga, halalbihalal dan reuni diganti dengan pertemuan yang bersifat virtual.

Selain itu, Covid-19 juga memaksa semua orang agar bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, meski hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Perubahan ini ditandai dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Peraturan Pemerintah ini, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.



DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB⁴, setelah sebelumnya Kabupaten Tegal memutuskan *lockdown* lokal. Wilayah yang menerapkan PSBB ini harus melakukan beberapa strategi pencegahan penularan Covid-19 seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, hingga pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Kebijakan ini mau tak mau mengharuskan seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri.

Kebijakan PSBB memang tidak diterapkan secara nasional, meski demikian, imbauan untuk melakukan *physical distancing* atau jaga jarak secara fisik juga harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini kemudian memunculkan kampanye “Di Rumah Saja”, sehingga semua aktivitas dilakukan di rumah atau lingkungan terdekat.

Dari sekian perubahan tersebut, pandemi Covid-19 juga membuat solidaritas masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia semakin tinggi. Solidaritas bagi masyarakat di desa juga bisa menjadi modal sosial untuk bisa dimanfaatkan menjadi ketahanan sosial dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Kita bisa melihat meningkatnya solidaritas masyarakat ini dari hal-hal yang kecil, seperti pembagian masker gratis, dapur umum yang kembali diaktifkan, hingga sistem-sistem desa lama yang kembali dilakukan, seperti ronda dan jimpitan warga.

Pandemi Covid-19 secara tak langsung memberikan pelajaran bahwa semua lini kehidupan harus bisa beradaptasi karena yang paling bisa bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi terhadap situasi ini dengan baik.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.



Langkah-langkah GP Ansor di tengah situasi pandemi

Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai organisasi kepemudaan yang merupakan badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) melakukan beberapa langkah strategis untuk mengajak pemuda agar bisa bertahan (*survive*) di tengah situasi pandemi.

Langkah pertama, yakni ketika melakukan proses kaderisasi dan acara-acara terkait, GP Ansor selalu mengajak pemuda untuk bisa merefleksikan bagaimana konsep hidup manusia. Konsep ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, alam, dan juga dengan Tuhan. Artinya, memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Seorang pemuda harus bisa menjadi agen kasih sayang bagi lingkungan serta bagi orang lain.

Dalam jurnal yang berjudul *Hubungan Antara Tuhan, Manusia dan Alam dalam Al-Quran*,⁵ dijelaskan bahwa hubungan segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam secara analogis dapat disimpulkan bahwa alam dan manusia merupakan makhluk yang mengandaikan hubungan yang sejajar dalam mengabdikan kepada Allah. Untuk mencapai Allah maka manusia akan menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an, sementara alam akan berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah.

Kedua, saya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh ulama NU enam tahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada Mukhtamar

5 Sahidah, Ahmad. 2017. "Hubungan Antara Tuhan, Manusia dan Alam dalam al-Quran; Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu". *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 5 (1).



NU di Magelang tahun 1939 yang menetapkan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam konsep Mabadi Khaira Ummah. Untuk membuat suatu tatanan masyarakat yang baik, para ulama menggunakan istilah *khoiru ummah* atau umat terbaik. Jadi untuk menuju *khoiru ummah* perlu dibentuk karakter seseorang, dalam hal ini adalah pemuda.

Dilansir dari NU Online⁶, Mabadi Khaira Ummah meliputi *ash shidqu* (benar) tidak berdusta, *al-wafa bil 'ahd* (menepati janji), dan *at-ta'awun* (tolong-menolong). Inilah yang kemudian disebut dengan Trisila Mabadi atau *mabadi khaira ummah ats-tsalasah*.

Pada perkembangannya, dalam Munas NU di Lampung pada tahun 1992, Trisila Mabadi ini dikembangkan menjadi Pancasila Mabadi atau *mabadi khaira ummah al-khamsah*, dengan menambahkan prinsip *'adalah* (keadilan) dan *istiqamah* (konsistensi/keteguhan).

Ketika seorang pemuda sudah memiliki karakter yang kuat maka ia akan bertahan dalam situasi apa pun karena ia memiliki kemampuan untuk *survive* dan memiliki visi dalam hidupnya. Untuk membentuk karakter pemuda, penting untuk melatihnya berpikir secara berkesinambungan dan konsisten, dalam terminologi Arab disebut dengan *istikamah*. Selain itu, seorang pemuda berkarakter harus memiliki kejujuran tinggi dan dapat dipercaya; memiliki sifat solidaritas dan gotong royong serta *ta'awun*; bersikap adil kepada diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan.

6 NU Online. 2015. "Mabadi Khaira Ummah". *NU Online*, 8 Desember 2015, dilihat 9 Juli 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/64148/mabadi-khaira-ummah>.



Membentuk pemuda desa yang berkarakter dan memiliki *skill*

Untuk bisa menjadi seorang pemuda yang adaptif dan bertahan dalam situasi tertentu diperlukan karakter dan kemampuan hidup yang mumpuni. Karakter yang sudah dibentuk oleh seseorang juga harus diiringi dengan berbagai kemampuan lain, seperti pembekalan ilmu pengetahuan, kemampuan (*skill*), dan membangun kapasitas seseorang. Kemampuan tersebut dapat dibentuk dengan beberapa cara. Menurut saya, yang terpenting adalah memberikan akses atau kebijakan yang berpihak kepada pemuda desa. Misalnya, akses terhadap pendidikan, termasuk pelatihan vokasi atau *life skills* yang harus didukung oleh pemerintah; akses terhadap teknologi; hingga akses terhadap dana desa.

Selain itu, dibutuhkan kemampuan untuk membangun kolaborasi dan bekerja sama dengan semua sektor untuk membangun ekosistem yang mandiri. Beberapa bidang bisa diintegrasikan untuk menciptakan sebuah keutuhan. Misalnya, dengan mengkolaborasi bidang pertanian dengan teknologi dan digitalisasi. Seperti diketahui, bidang pertanian memang merupakan salah satu corak desa yang bisa dijadikan modal ketahanan, tetapi kita bisa melihat bahwa aparat desa tidak terlalu responsif dalam hal ini. Saya kira penting untuk membangun pemuda-pemuda desa bisa berkolaborasi dan berintegrasi dengan hal ini.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah memberikan ruang kepada pemuda untuk bereksperimen secara langsung. Hal ini berkaitan dengan pepatah lama bahwa ilmu dapat didapatkan dari



pengalaman. Ketika seseorang sudah terjun langsung di lapangan, ia akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan menerapkannya kepada hal-hal yang lebih konkret. Jadi, penuhi hak pemuda untuk bisa bereksperimen secara luas untuk kemudian berkarya dan dapat memaknai hidupnya sesuai dengan karakter yang terbentuk.

Perlu dicatat bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang baik untuk meriset ulang terkait bagaimana cara kita hidup, termasuk mengelola negara dan desa. Saya kira ini merupakan tugas bersama, baik bagi otoritas pemerintah dan diri kita sendiri untuk turut serta berpartisipasi menuju lingkungan yang adaptif. Hal ini memiliki orientasi untuk menjaga keseimbangan kosmis secara holistik guna membangun kualitas kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Profil Narasumber

Kebhinnekaan Indonesia harus dibingkai, bagaimana menjadi negara yang harmonis, toleran, dan damai. Sebab kebhinnekaan adalah pusat gravitasi NKRI. Sepak terjang Adung Abdul Rahman di Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) cukup menonjol. Terutama saat dia dengan tegas menolak gagasan khilafah untuk menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, substansi Islam adalah *rahmatan lil' alamin*. Kasih sayang bagi semesta alam, bukan muslim saja. Baginya, nenek moyang Nusantara telah berhasil mengambil inti sari dari semua agama dan mewujudkannya berupa Indonesia. Karena itu generasi selanjutnya harus menjaga Indonesia dengan beragam nilai-nilai luhurnya. Adung Abdul



Rahman menilai jika gagasan khilafah tersebut hanya tataran wacana dan diskusi, masih bisa ditolerir. Sebab hal itu menjadi bagian dari kebebasan berekspresi dan kajian ilmiah. Namun, kalau sudah mengajak masyarakat mendirikan negara di luar NKRI dan Pancasila, jelas harus dilarang. Karenanya Adung bersama GP Ansor siap berada di barisan terdepan untuk mengamankan NKRI dan Pancasila. Saat ini ia menjabat sekretaris jenderal GP Ansor. Organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) untuk mewadahi pengembangan generasi muda. Lebih jauh, Adung juga peduli dengan pengembangan pemuda desa. Menurutnya, pemuda desa harus lebih dilibatkan dalam pengembangan desanya. Bekal awalnya justru bukan teknologi atau pengetahuan, tetapi pembentukan karakter. Karena pemuda desa yang karakternya telah terbentuk akan bisa menghadapi dinamika zaman. Contohnya seperti saat menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini.

Pada Kongres Kebudayaan Desa ini, Adung Abdul Rahman akan menjadi narasumber di hari keempat, 4 Juli 2020 dengan topik Pemuda: Menata Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa dalam Tatanan Indonesia Baru.





Pemuda dan Pembangunan Desa¹

Sunanto

Sejak tahun 1928 hingga 1998, mulai dari Sumpah Pemuda sampai Reformasi, peran penting pemuda tak pernah bisa dilepaskan dari berbagai perubahan sosial di tiap zaman. Pemuda dengan karakteristiknya yang dinamis, kritis, dan haus akan perubahan menjadi wajah tersendiri dalam masyarakat. Pemuda dari berbagai latar belakang, antara lain pelajar, mahasiswa, santri, petani, buruh, dan sebagainya selalu menggeliat apabila berhadapan dengan ketimpangan yang ada.

1 Disarikan oleh Iswan Heri

Salah satu organisasi kepemudaan pertama yang muncul di Indonesia adalah Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908. Budi Utomo muncul atas inisiatif mahasiswa STOVIA (sekolah keterampilan untuk dokter pribumi), OSVIA (sekolah keterampilan untuk administrator pribumi), sekolah-sekolah guru, serta sekolah-sekolah pertanian dan kedokteran hewan. Tokoh pendirinya antara lain Dr. Wahidin Soedirohoesodo dan Tjipto Mangunkusumo.

Setelah kemunculan Budi Utomo, organisasi mahasiswa maupun organisasi yang dipelopori oleh kaum intelektual mulai tumbuh. Muncul Serikat Dagang Islam (yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam), Sarekat Ambon, Jong Java, Pasundan, Sarekat Sumatera, Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia (yang menjadi embrio Perhimpunan Indonesia), dsb. Organisasi-organisasi kepemudaan ini akhirnya berkumpul dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 serta melahirkan sumpah pemuda. Setelah era tersebut, pemuda dan mahasiswa terlibat dalam revolusi fisik merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Sumpah Pemuda merupakan sebuah titik yang menyatukan gerakan pemuda di Indonesia serta menjadi tonggak sejarah lahirnya revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan pemuda yang mulanya bersifat kesukuan dan sektarian berubah menjadi sebuah gerakan kolektif dan strategis. Egoisme serta kepentingan kelompok dipinggirkan, sedangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih luas menjadi perhatian utama.

Kini sudah 75 tahun bangsa ini merasakan kemerdekaan. Tentu saja banyak kemajuan dan hal positif yang dicapai jika dibandingkan



masa yang telah lampau. Sektor pendidikan, infrastruktur, kehidupan berdemokrasi, serta sektor-sektor yang lain dapat kita rasakan perubahannya. Namun, rasanya terlalu ceroboh jika kita berpuas diri sekarang. Masih banyak persoalan-persoalan sosial yang mesti segera dicari jalan keluarnya. Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, kelestarian lingkungan, dan sederet persoalan lainnya sudah menunggu untuk dituntaskan.

Hal ini menjadi pengingat bahwa membangun peradaban bangsa bukanlah perkara yang mudah. Perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk mencari jalan keluarnya. Dan sekali lagi, pemuda tidak bisa berpangku tangan serta dituntut aktif mendorong terwujudnya bangsa yang lebih maju dan bermartabat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktor utama yang membuat pemuda menjadi motor perubahan sosial adalah idealisme yang kuat dan konsisten. Idealisme yang diasah dengan analisa yang tajam, ilmu pengetahuan, dan pembacaan kritis pada realita sosial ini kemudian mengkristal menjadi falsafah dan sikap hidup keseharian. Revolusi 1945 dan Reformasi 1998 adalah salah dua bukti yang bisa kita lihat. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pemuda muncul sebagai oase dalam kondisi sosial yang mampat dan roda pemerintahan yang macet.

Idealisme yang mengkristal dan menjadi pedoman dalam mengambil sikap tentunya membutuhkan konsistensi. Kita bisa melihat contohnya pada sosok Bung Karno dan Bung Hatta yang sejak masa muda telah menggembelng dirinya sendiri untuk membangun mimpi akan Indonesia merdeka. Tidak mudah memang, tetapi kita semua bisa melihat bagaimana akhirnya



Indonesia sanggup merdeka dari cengkeraman penjajah. Tentu saja banyak pemuda yang tumbuh sezaman dengan Soekarno-Hatta, tetapi tidak semua memiliki idealisme yang sama dengan mereka berdua.

Maka tepatlah pesan Tan Malaka tentang idealisme kaum muda. Tan berpesan bahwa “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”.

Potensi Strategis Desa

Peristiwa hari ini adalah guru yang sangat berharga bagi kaum muda serta seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita dipaksa belajar bahwa tantangan terbesar dan terberat setelah masa kemerdekaan bukan hanya tentang modernisasi maupun alih teknologi seperti di negara maju. Tantangan maha besar itu ternyata berupa virus Covid-19 yang saat ini telah menjadi pandemi. Seluruh sudut dunia tak dapat menghindar dari serangannya. Kita bisa melihat bagaimana Cina, Italia, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya dihantam tsunami Covid-19. Laju perekonomian dunia tiba-tiba terpaksa terhenti dan setiap orang mengalami imbasnya.

Problem lanjutan setelah masyarakat tersendat arus ekonominya adalah keterbatasan masyarakat untuk memenuhi stok pangan. Akibat pendapatan yang anjlok drastis maka kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi bahan pangan pun terbatas. Di kota-kota besar seperti Jakarta sempat terjadi fenomena “*panic buying*” bahan makanan di beberapa pertokoan karena ketakutan masyarakat akan tersedianya bahan makanan. Beruntung, hal itu tidak terjadi lama karena ternyata stok pangan kita masih mencukupi.



Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan stok pangan kita akan mencukupi kebutuhan masyarakat? Apalagi mengingat belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Maka langkah strategis yang perlu disiapkan ke depan adalah dengan memperkuat sektor pertanian kita. Jangan sampai krisis di sektor kesehatan ini juga ikut menciptakan krisis baru, yakni krisis pangan. Sudah saatnya membenahi sektor pertanian sekarang juga. Melihat potensi dan sumber daya alam yang ada maka harus kita akui bahwa sumber-sumber bahan pangan kita lebih besar berada di desa. Desa sebenarnya telah memiliki kearifan lokal tersendiri dan dikelola sejak lama, contohnya lumbung desa.

Konsep lumbung desa sudah digunakan warga desa sejak puluhan tahun sebagai tabungan stok pangan kolektif seandainya paceklik tiba. Lumbung desa dekat dengan tradisi masyarakat agraris pedesaan. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan masyarakat industri khas perkotaan yang cenderung individualis dan miskin budaya kolektif. Alhasil ketika pandemi melanda, warga desa tak perlu merasakan panik yang berlebihan akan ketersediaan stok pangan. Itulah kenapa gejala “*panic buying*” hanya terjadi di perkotaan dan sangat jarang terjadi di desa.

Tantangan Pemuda dan Pembangunan Desa

Sayangnya selama ini desa lebih sering dipandang sebelah mata dan ditinggalkan. Tradisi agraris di pedesaan sering dianggap usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya warga desa pun berbondong-bondong meninggalkan desa demi mengejar



impian dan kesejahteraan di kota. Berbeda dengan desa, kota dijadikan simbol pusat kemajuan, kemodernan, dan kesejahteraan. Ingin hidup mapan, terpendang, dan sejahtera? Pergi ke kota solusinya.

Ketimpangan desa-kota semakin menjadi ketika tenaga kerja produktif serta kaum muda di desa semakin berkurang karena mengadu peruntungan di kota. Hal ini membuat roda perekonomian di kota dapat berputar lebih kencang daripada di desa. Hal ini pulalah yang menyebabkan pembangunan fisik lebih berjalan masif di kota.

Setidaknya ada tiga persoalan yang dihadapi kaum muda di desa. Pertama, pendidikan dan pengangguran. Terbatasnya fasilitas pendidikan di desa menyebabkan SDM di desa menjadi kalah tangkas dan kalah bersaing dibandingkan SDM di kota. Karena faktor pendidikan yang rendah ini pula maka susah ditemukan inovasi-inovasi pertanian di desa. Sektor pertanian yang tidak inovatif dan efisien menyebabkan pamor pertanian semakin redup. Pada akhirnya ada kelompok kaum muda yang lebih memilih menganggur daripada bekerja di sektor pertanian yang dirasa kurang menjanjikan. Pilihan yang lain adalah meninggalkan desa dan mencari sumber ekonomi baru di kota. Kekurangan SDM muda ini semakin membuat sektor pertanian di desa susah berkembang.

Masalah kedua adalah keahlian (*soft skill*). Tanpa fasilitas pendidikan yang mendukung maka kreativitas dan keahlian masyarakat desa susah berkembang. Oleh karena itu, agak sulit



rasanya membayangkan alih teknologi dapat terjadi dengan cepat di desa tanpa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di desa.

Problem ketiga adalah akses teknologi dan transportasi. Keterbatasan akses teknologi serta transportasi semakin membuat masyarakat desa jauh dari kemajuan. Maka dari itu selain peningkatan kualitas SDM desa juga perlu ditopang sektor transportasi yang baik dan mudah diakses.

Jalan Transformatif Pemuda Muhammadiyah

Berdasarkan uraian di atas, ada dua hal mendasar yang harus mulai dibenahi hari ini. Pertama, persoalan pembangunan desa. Kedua, persoalan pengelolaan SDM muda di desa. Perlu gerakan simultan untuk membangun desa yang berkembang. Oleh karena itu, pemuda Muhammadiyah menawarkan tiga alternatif jalan transformatif bagi desa.

Pertama, pemuda diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mulai detik ini juga perlu disusun strategi agar pemuda tertarik untuk tinggal dan membangun desanya sendiri. Desa perlu dirombak dan ditata ulang sedemikian rupa agar terlepas dari kesan muram dan ketinggalan zaman. Di sisi lain, perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung agar SDM di desa bisa berkembang menjadi insan yang kreatif dan inovatif. Digitalisasi desa bisa menjadi salah satu contoh program untuk membuka desa kepada dunia sehingga desa dikenali di dunia luar dan sebaliknya juga desa dengan cepat mampu mengenali dan memahami perubahan dunia luar yang berjalan secara dinamis.



Kedua, potensi desa dikelola secara integratif, holistik, dari hulu hingga hilir. Pengelolaan desa haruslah dijalankan menggunakan prinsip profesionalitas dan transparan. Dengan demikian, akan tercipta sikap saling percaya antara warga dengan aparat desa itu sendiri. Kerja sama kedua belah pihak akan melahirkan percepatan pembangunan bagi desa itu sendiri. Hal yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dalam membuat pemetaan potensi desa. Dengan demikian, warga desa dapat terlibat secara aktif dalam mengelola strategi dan optimalisasi potensi desa demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Ketiga, penyediaan lapangan pekerjaan dengan diiringi pelatihan *soft skill* serta keterampilan-keterampilan yang menjawab kebutuhan zaman. Pemetaan dan pengelolaan potensi desa yang baik akan dapat membuka potensi peluang usaha baru. Dengan demikian, desa akan melahirkan peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih heterogen. Terbukanya lapangan pekerjaan baru tentu membutuhkan keterampilan-keterampilan baru juga. Maka dari itu perlu dirancang kegiatan-kegiatan maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian warga desa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Apabila tiga langkah alternatif di atas dapat dijalankan secara baik maka kemajuan desa rasanya tinggal menunggu waktu saja. Tidak mudah memang untuk melakukan sebuah perubahan. Namun, dengan tekad yang kuat dan semangat yang kokoh, perubahan akan terjadi sedikit demi sedikit.



Sejarah adalah guru yang terbaik. Kita sepatutnya belajar dari gerakan kaum muda di tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda dan embrio kemerdekaan bangsa. Di tengah kondisi terhimpit dan serba sulit, semangat kaum muda ternyata tak pupus dimakan zaman.

Perang dengan pandemi Covid-19 masih jauh dari kata usai. Mari susun ulang seluruh energi dan pikiran demi membangun desa. Dari desa pulalah langkah awal tata dunia baru ini dimulai.

Profil Narasumber

Perjalanan hidupnya tidak biasa. Saat menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sunanto memilih tinggal di Panti Asuhan Madura (PAM) Sumenep agar bisa tetap sekolah karena keluarganya tergolong kurang mampu. Sejak itulah ia banyak berkiprah di lingkup kepemudaan Muhammadiyah. Mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Saat bersafari sebagai ketua tersebut Cak Nanto kerap mengingatkan agar kader Muhammadiyah konsisten menjadi pemimpin yang baik. “Banyak kader Muhammadiyah yang masuk di pemerintahan. Namun masalahnya, setelah duduk di sana, apakah mereka tetap mengaku sebagai kader Muhammadiyah?” ungkapnya. Padahal menurutnya, dakwah kekuasaan tidak kalah penting dengan dakwah ekonomi. Sehingga Muhammadiyah tidak hanya mengambil peran melalui pendekatan ekonomi, tetapi juga melalui pendekatan politik meskipun Muhammadiyah harus tetap menjaga jarak etis



secara politik agar tidak terjebak pada politik praktis. Pandangan tersebut merupakan buah pengalamannya saat juga aktif di luar Muhammadiyah. Seperti saat ia menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Jawa Tengah, periode 2011-2014, dan sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).





Pemuda dan Aksi Nyata: Strategi Menciptakan Intelektual Desa untuk Indonesia Maju¹

Mahmud Yunus Mustofa, S.Pd.I., M.Pd.

“Kita tidak bisa menyiapkan masa depan untuk pemuda. Tapi kita bisa menyiapkan pemuda untuk masa depan”

Pendahuluan

Jika kita melihat negara laiknya rumah maka desa menjadi fondasi yang mampu menopang serta menentukan rumah itu kuat atau tidak. Jadi, apabila ingin berdiskusi mengenai masa depan negara, pijakan terbaik untuk memulainya adalah dari desa.

¹ Call for Papers

Kemajuan desa bisa menjadi indikator keberhasilan pemerintah mengatur negara. Hal ini yang mampu dibaca oleh Joko Widodo. Presiden sadar betul akan pentingnya peran desa untuk mendorong kemajuan Indonesia. Berdasarkan UU Desa No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pemerintah ingin memberikan *special power* kepada desa untuk membangun kemandiriannya. Anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Pada tahun 2015, dana yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp20,7 triliun, meningkat di tahun 2016 menjadi Rp46,98 triliun, dan terus meningkat sampai sekarang.

Paradigma pembangunan yang diusung oleh presiden memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar sedang bersiap diri untuk menatap peluang ke depan. Ke depan, salah satu yang dihadapi Indonesia adalah bonus demografi. Pada tahun 2030-2045, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Angka ini memberikan gambaran bahwa Indonesia akan mengalami titik emas puncak kejayaan, atau justru sebaliknya. Pemuda yang akan menjadi tulang punggung negara nantinya menjadi faktor utama. Hal ini dikarenakan pada saat di mana Indonesia mengalami surplus pemuda, hanya ada dua kemungkinan, yaitu antara pemuda yang produktif dan pemuda yang kontraproduktif.



Pemuda produktif menjadi harapan besar bagi bangsa dan negara untuk bisa bersaing di dunia global karena pemuda akan menjadi mayoritas populasi pada saat itu (*Teenagers will be the majority population*). Mereka diharapkan mampu membawa angin segar perubahan bagi kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Pemuda produktif ini merupakan aktor-aktor intelektual yang akan memberikan sumbangsih pemikiran serta tenaganya demi kemajuan bangsa.

Menciptakan pemuda produktif bukanlah hal yang mudah. Konsistensi dan ketekunan sangat dibutuhkan sehingga nantinya pemuda yang lahir tidak hanya generasi yang karbitan. Matang hanya secara lahir, tetapi tidak ada esensi di dalam batin. Kesesuaian antara akal dan budi sangat penting agar nanti pemuda harapan bangsa tak tergiur dengan jerat korupsi.

Untuk itu diperlukan adanya strategi yang tepat guna menciptakan generasi muda yang akan menjadi bibit intelektual desa. Ke depan, para pemuda inilah yang akan melakukan aksi nyata guna membaca kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa untuk nantinya akan diejawantahkan melalui inovasi-inovasi sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Prinsip kerja nyata semacam ini sangat penting agar program yang akan di jalankan di desa menjadi efektif dan efisien.

Membentuk para intelektual desa merupakan proyek jangka panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, peningkatan *human capital* yang ada di desa melalui pemuda merupakan prioritas utama agar desa mampu dipegang oleh orang-orang yang tepat,



tidak hanya tinggi dalam ilmu, cakap dalam *skill*, tetapi juga luhur dalam perilaku.

Gagasan Utama SEC (Sembung Education Centre): Strategi Membentuk Intelektual Desa

Bonus demografi menjadi jalan Indonesia untuk melakukan lompatan besar. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik agar Indonesia tidak lagi menjadi negara penonton, tetapi bisa menjadi episentrum dari ekonomi global. Karena berpijak pada teori *the new form of competition*, keunggulan suatu bangsa tidak lagi didasarkan atas *comparative advantage* tetapi *competitive advantage* yang ditentukan oleh kualitas penduduknya.

Saat ini *human capital* menjadi hal yang utama, apalagi era modern sudah mulai menjadikan *Artificial Intelligent* sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnya tingkat kompetisi antarmanusia. Untuk itu jika masing-masing individu tidak dibekali dengan kemampuan yang lebih, bukan tidak mungkin dia akan tersingkir dari kompetisi global.

Akselerasi pembangunan *human capital* menjadi isu utama yang harus senantiasa didengarkan. Karena pemuda menjadi ujung tombak negara yang akan melesat menuju target yang sudah dicanangkan. Menyiapkan pemuda produktif semacam ini membutuhkan program yang tepat. Salah satunya adalah melalui pendidikan karena pendidikan menjadi hal dasar bagi manusia agar bisa bersaing di dunia global.



Setidaknya ada lima keterampilan yang harus dimiliki pemuda desa saat ini. Kelima hal itu adalah:

1. Kompetensi Akademik , Sosial, dan Vokasi
2. Kompetensi Kepercayaan Diri
3. Kompetensi Komunikasi dan Koneksi
4. Kompetensi Karakter Diri
5. Kompetensi Kepedulian untuk Berbagi

Untuk menjawab itu semua, penulis mengagas satu gerakan kolektif bernama SEC (*Sembung Education Centre*). *Sembung Education Centre* adalah sebuah gagasan kecil yang berasal dari kegelisahan melihat potensi besar sumber daya manusia di desa, tetapi belum bisa dimaksimalkan. Banyak pemuda desa yang mampu mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi, bahkan beberapa masuk perguruan tinggi ternama seperti Undip, ITB, UI. Tidak hanya sarjana, beberapa sudah ada yang bergelar magister dan juga sedang menyelesaikan program doctoral.

Potensi ini setidaknya bisa menjadi dasar kuat untuk pembangunan desa ke depan. *Sembung Education Centre* diharapkan mampu menjadi pusat berkumpulnya gagasan-gagasan hebat pemuda desa sesuai bidangnya. Nantinya, masing-masing dari mereka akan melakukan pembacaan potensi desa untuk selanjutnya diwujudkan melalui program yang bermanfaat.

Program ini setidaknya bisa menjadi jalan kesuksesan bagi pemuda desa. Tentu untuk mencapai ini semua pemuda membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar mereka tidak merasa sendiri



dalam mengemban tugas bangsa. Sebagai gambaran, berikut adalah model piramida jalan pemuda menuju kesuksesan.²



Berdasarkan kebutuhan di atas, ada 4 isu utama yang difokuskan dalam SEC, yaitu pendidikan, ekonomi, agama, dan lingkungan. *Pertama*, bidang pendidikan. Kami memiliki banyak lulusan S-1, S-2, bahkan S-3. *Kedua*, Bidang ekonomi memiliki para sarjana yang mulai merintis usaha berdasarkan kearifan lokal yang ada. *Ketiga*, bidang agama, fokus pada pembinaan keagamaan pemuda agar memiliki akhlak yang baik. Untuk mewujudkan ini, kami menggandeng organisasi keagamaan untuk bersinergi agar berjalan maksimal. Terakhir, bidang lingkungan yang berkonsentrasi terhadap penjagaan sumber daya alam yang dimiliki desa.

2 Karen Johnson Pitman et.al. 2005. Preventing Problems, Promoting Development, Encouraging Engagement; *Competing Priorities or Inseparable Goals?*. USA: The Forum for Youth Investment.



Untuk saat ini yang sudah berjalan adalah program pendidikan. Pendidikan dipilih karena sejatinya pendidikan mampu menjadi motivasi untuk bisa mengaktualisasikan diri, nantinya akan muncul integritas untuk ikut memberikan perubahan sesuai dengan tantangan zaman.³ Selain itu sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa manusia sebagai *homo educantum*, yang artinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan.⁴

Melalui program turunan yang kami namakan *Sembung Language Centre*, kami bersama menyiapkan generasi muda untuk cakap dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Melalui kegiatan “Ngaji Bahasa”, anak-anak usia sekolah diajari bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Bahasa menjadi isu utama untuk membuka wawasan yang lebih luas nantinya. Bahasa sangat penting karena dunia global menuntut adanya kecakapan dalam berbahasa asing.⁵

Selain itu, dalam waktu dekat kami juga sedang mempersiapkan satu program lanjutan tentang penguatan literasi pemuda desa yang kami beri nama “JAKA SEMBUNG” (Jelajah Pustaka Desa Sembung). Program ini merupakan perpustakaan digital yang kami tuju untuk meningkatkan minat literasi pemuda desa.

Besar harapan kami bahwa program-program ini akan menjadi modal ke depan bagi pemuda desa untuk meraih beasiswa, baik di luar dan di dalam negeri. Ketika mereka memiliki akses pendidikan yang baik tentu saja akan mendongkrak sumber daya manusia di

3 Ilahi, Muhammad Takdir. 2012. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, (Hlm. 5). Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

4 Junaedi, Mahfud. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Depok: Kencana.

5 Nishanti, Rajathurai. 2018. “Important of learning English in today world”. *International Journal of Trend in Scientific Research and Deevlopment (IJTRSD)*, Vol. 3.



desa sehingga dengan sendirinya kualitas kehidupan lain seperti ekonomi akan ikut meningkat.

Program ini juga lahir karena kesadaran bahwa pemerintah sudah memberikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan. Tak kurang dari Rp508 triliun dianggarkan oleh pemerintah untuk pendidikan. Beberapa program seperti KIP kuliah menjadi salah satu usaha konkret pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu adanya penambahan anggaran menjadi Rp55 triliun untuk dikelola LPDP menjadi indikasi bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menyiapkan generasi emas ke depan. Anggaran ini meliputi semua biaya mulai dari pendidikan hingga biaya hidup serta penelitian. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi pemuda untuk tidak meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan. Pemerintah sudah membuka lebar akses agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses pendidikan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya.

Menanggapi hal tersebut, program ini diharapkan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain agar bisa menjadikan pemuda desa menjadi insiator terbentuknya intelektual-intelektual desa secara berkelanjutan. Agar pemuda tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut serta mengambil peran untuk memajukan desa. Faktanya, pemuda di desa cenderung memiliki kepedulian sosial yang lebih. Penelitian menunjukkan bahwa pemuda di pedesaan memiliki koneksi yang lebih kuat dibandingkan pemuda di perkotaan.⁶

6 Oosterhof, Benjamin, Aaron Metzger, Lauren Alvis. 2019. "Similarities and Differences in Adolescents' Organized and Civic Activity Networks across Rural and Non-Rural Communities". *Journal for Youth and Adolescence*.



Pemuda desa sudah saatnya harus berani tampil sebagai inisiator serta bisa memengaruhi pemuda sebayanya agar mau ikut membangun desa. Keberanian ini sangat dibutuhkan agar pemuda tidak hanya terjebak dalam gelembung, tetapi mampu menjadi gelombang.⁷ Analogi ini cukup masuk akal, gelembung berarti pemuda hanya terjebak dalam satu tindakan tanpa ada solusi jitu kemudian.

Mampu menjadi gelombang berarti mampu bergerak secara dinamis menjadi roda penggerak kemajuan. Gelombang juga bisa menjadi sumber energi yang besar untuk menghancurkan segala rintangan yang ada. Untuk itu keberanian pemuda saat ini mestinya tidak hanya sebatas menjadi gelembung, tetapi bisa menjadi gelombang yang membawa energi besar untuk perubahan.

Seperti yang penulis awal sampaikan bahwa kita tidak bisa menyiapkan masa depan untuk pemuda, tetapi kita bisa menyiapkan pemuda untuk masa depan. Semangat untuk menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan Indonesia penting untuk terus digalakkan. Agar istilah “Bali Deso Bangun Deso” tidak hanya menjadi wacana semata, tetapi bisa menjadi aksi nyata.

Simpulan

Aksi nyata dari para pemuda desa saat ini sangat dibutuhkan. Melalui program *Sembung Education Centre* pemuda akan berperan aktif untuk menyiapkan intelektual desa selanjutnya. Jadi, desa tidak akan pernah kehabisan stok pemuda yang berdaya saing tinggi.

7 Widodo, Sumardi. “Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia”.



Melalui program ini pemuda juga akan mampu membaca potensi desa untuk kemudian mengejawantahkannya melalui program-program yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan desa. Bayangkan ketika banyak program serupa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia. Harapan agar desa menjadi episentrum perubahan akan menjadi nyata.

Saat ini untuk melakukan perubahan di desa yang dibutuhkan bukanlah sekadar teori. Melainkan aksi nyata menjadi solusi agar desa kembali berdaya. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pemuda di desa mampu mengimplementasikan ilmu serta kemampuannya demi kemajuan desa. Gerakan kecil ini bisa menjadi kekuatan besar jika dilakukan secara bersama-sama.

Profil Penulis

Mahmud Yunus Mustofa, S. Pd.I., M. Pd. lahir di Batang, 10 Mei 1993. Pendidikan dasar ditempuhnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Sembung. Pendidikan menengah pertama ditempuhnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Huda Banyuputih. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Nahdlatul Ulama Banyuputih. Gelar sarjana pendidikan di peroleh dari UIN Walisongo, kemudian melanjutkan gelar master pendidikan (Beasiswa Kemenag Pusat) di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saat ini menjadi awardee LPDP Santri 2019 dan akan melanjutkan studi S3 bidang studi Islam di UIN Walisongo Semarang. Penulis aktif di berbagai kegiatan seperti PMII, ANSOR dan LTN NU. Pernah menjabat sebagai ketua Keluarga Mahasiswa



Batang Semarang (KMBS), menjadi inisiator terbentuknya Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI), dan pernah menjadi Duta Genre Kota Semarang. Saat ini penulis sedang mengikuti program pengembangan bahasa di Centre for Language Development UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, penulis juga menggeluti isu-isu desa dan kedaerahan. Mengawal kebijakan desa serta tergabung dalam BUMDES OPTIMIS Desa Sembung. Saat ini sedang mencoba menggagas program *Sembung Education Centre* untuk memberikan akses lebih kepada pemuda desa untuk mendapatkan akses pendidikan terutama beasiswa.





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa

Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harianarganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan



merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.



Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasannya. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seandainya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus



menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19¹.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan,

1 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK².

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun³.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada

2 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

3 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.



Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?



Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal



abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *rubiyah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada



sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.



Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai



bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkarakut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia atautkah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi



sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya,



layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁴

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

4 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.



Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan

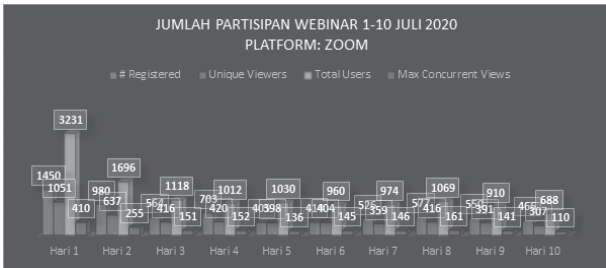


dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



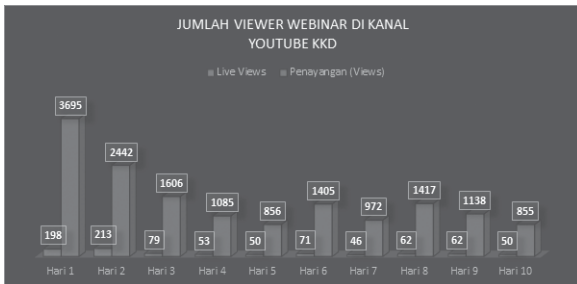
Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

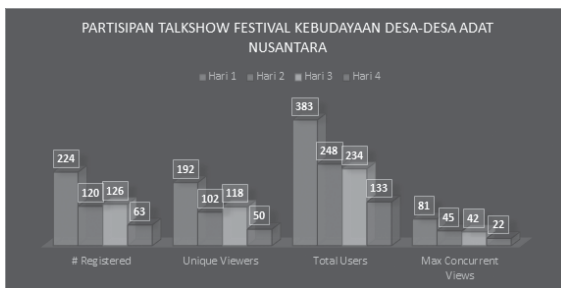
Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube



Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

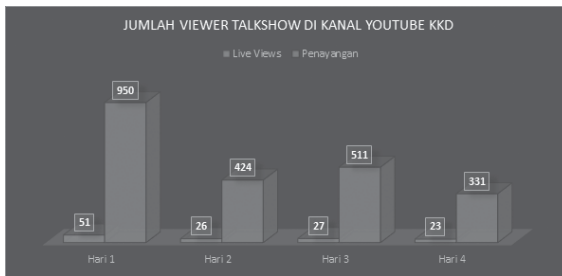
Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam *series talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

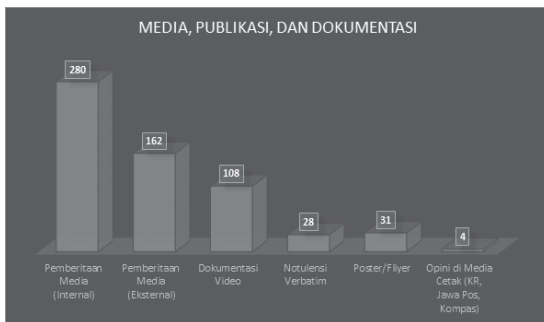


Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesa.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarei semua agenda kongres.

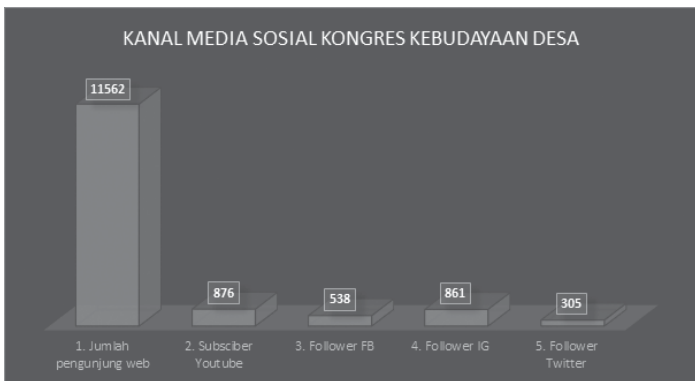
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesas.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi



dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodukir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki



kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah



Desa Panggunharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikenco
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

Tim Buku dan Call Of Papers

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Arif Gunawan
3. Ageng Indra Sumarah
4. Agus Teriyana
5. Ahmad Yasin
6. Amanatia Junda Solikhah
7. Asy Syaffa Nada Amatullah
8. Berryl Ilham
9. Chusna Rizqati
10. Citra Maudy Mahanani
11. Rheisnayucyntara
12. Dadang Ari Murtono
13. Diah Rizki Fitriani
14. Dwi Cipta
15. Dyah Permatasari
16. Fawaz
17. Fitriana Hadi
18. Fiqih Rahmawati
19. Gregorius Ragil Wibawanto
20. Irfan Afifi
21. Iswan Heriadjie
22. Ketjilbergerak
23. Kusharditya Albihafifzal
24. Prima Hidayah
25. Rio Anggoro Pangestu
26. Rofi Ali Majid
27. Suhairi Ahmad
28. Yona Primadesi



JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





Sinergi
Inovasi Desa



KPK
KEMENTERIAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERIKANAN DAN
KEMENTERIAN KETAHANAN PANGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, RELIGI DAN
TANAMAN BANGSA

